LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sesuai amanat dari Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan atas penggunaan anggaran Tahun 2024.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pembangunan, khususnya di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 27 Februari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. Aries Fhariandi, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197904222003121009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR x

BAB I

Latar Belakang 1

Maksud dan Tujuan 2

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 3

Sumber Daya 14

Sumber Daya Manusia 14

Sarana dan Prasarana 18

Permasalahan dan Isu Strategis 21

BAB II

Perencanaan Strategis 28

Perjanjian Kinerja 35

BAB III

Akuntabilitas Kinerja 48

Capaian Kinerja 48

Sasaran: Perencananaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas 51

Indikator:

Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) 51

Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 54

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 55

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional 55

Faktor Pendukung Keberhasilan dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja 57

Upaya Perbaikan/Peningkatan Kinerja 61
Sasaran: Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah 61
Indikator:
Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan dan Indeks Inovasi Daerah (IID) 61
Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 64
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 66
Perbandingan dengan Rata-rata Nasional 67
Faktor Pendukung Keberhasilan dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja 68
Upaya Perbaikan/ Peningkatan Kinerja 71
Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 72
Indikator:
Nilai SAKIP Bappeda 72
Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 74
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 ... 76
Faktor Pendukung Keberhasilan Ketercapaian Realisasi Kinerja 77
Upaya Perbaikan/ Peningkatan Kinerja 79
Indikator:
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80
Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 82
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 83
Faktor Pendukung Keberhasilan dalam Realisasi Kinerja 84
Upaya Perbaikan/ Peningkatan Kinerja 86

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja melalui Penerapan Manajemen Risiko …. 87

Indikator:

SAKIP Daerah Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja …… 87

Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 …… 89

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2025-2029 …. 90

Faktor Pendukung Keberhasilan / Penghambat Capaian Realisasi Kinerja ……... 91

Upaya Perbaikan/ Peningkatan Kinerja …… 93

Indikator:

Indeks Manajemen Risiko (MRI) ……. 94

Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 …… 96

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2025-2029 …. 97

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional …… 98

Faktor Penghambat Ketercapaian Realisasi Kinerja ……... 100

Upaya Perbaikan/ Peningkatan Kinerja ……. 100

BAB IV

Penutup ……. 108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang Per Desember Tahun 2025 ……..	1
Tabel 1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 …….	16
Tabel 1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 …….	17
Tabel 1.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Menurut Kondisi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 …….....	18
Tabel 1.5	Pemetaan Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau ……..	24
Tabel 2.1	Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau ……	29
Tabel 2.2	Cascading Visi, Misi, Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD,Tujuan Renstra dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau …….....	31
Tabel 2.3	Penetapan Indikator Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau ……..	32
Tabel 2.4	Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2021-2026 ……	33
Tabel 2.5	Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2025-2029 ……	34

Tabel 2.6 Target Kinerja Tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau …….. 35
Tabel 2.7 Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ……. 36

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau …….. 45

Tabel 2.9 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau ……... 46

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja (CK) Serta Hasil dan Penjelasan…… 48

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ……. 50

Tabel 3.3 Indikator Predikat Kualitas Perencanaan Berdasarkan Hasil Penilaian IPPN Pemerintah Provins i…… 51

Tabel 3.4 Resume Capaian Kinerja IPPN …… 51

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 …… 54

Tabel 3.6 *Trend* Perkembangan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau ……. 55

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2021 – 2026 …… 56

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional ……... 56

Tabel 3.9 Resume Capaian Kinerja Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan dan Indeks Inovasi Daerah (IID) …….. 64

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ……..... 65
Tabel 3.11 *Trend* Perkembangan Realisasi dan Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan …… 65

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra …… 66

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional …… 67

Tabel 3.14 Rentang Nilai SAKIP …….. 72

Tabel 3.15 Resume Capaian Kinerja SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau …….. 74

Tabel 3.16 Hasil Penilaian Komponen SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ……. 74

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 …… 75

Tabel 3.18 Trend Peningkatan Realisasi dan Capaian Kinerja SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau …….. 76

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra …… 77

Tabel 3.20 Resume Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat ……..... 80

Tabel 3.21 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau ……. 81

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ……. 82
Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Periode Sebelumnya ……. 82

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra …….. 84

Tabel 3.25 Bobot Nilai Komponen SAKIP …….. 87

Tabel 3.26 Resume Capaian Kinerja Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja …… 88

Tabel 3.27 Capaian Kinerja SAKIP Daerah Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 ……. 89

Tabel 3.28 *Trend* Realisasi dan Capaian SAKIP Daerah Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja …….. 89

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi dan Capaian SAKIP Daerah Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025 – 2029 …… 91

Tabel 3.30 Resume Capaian Kinerja Indeks Manajemen Risiko (MRI) …… 95

Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 ……. 96

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indeks Manajemen Risiko Provinsi Kepulauan Riau per Tahun ……... 97

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Manajemen Risiko Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025 – 2029 …… 98

Tabel 3.34 Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025……. 98

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Manajemen Risiko Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional …… 99

Tabel 3.36 Realisasi Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 …….. 103

Tabel 4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Badan Perencanaan, Penelitiand dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 …… 109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ……	4
Gambar 1.2	Diagram Persentase Perbandingan Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang dan Per Desember Tahun 2025 ……..	15
Gambar 1.3	Perbandingan Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan …….	16
Gambar 3.1	Rumus Capaian Kinerja …….	48
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Tahun 2025 ……	49
Gambar 3.3	Diagram Hasil Penilaian Dokumen PPD 2025 Provinsi Kepulauan Riau ……	53
Gambar 3.4	Grafik Perkembangan IPPN Provinsi Kepulauan Riau ……...	55
Gambar 3.5	Rumus Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan ……..	62
Gambar 3.6	Rumus Perhitungan Indeks Inovasi Daerah (IID) ……	63
Gambar 3.7	Grafik Peningkatan Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan …….	66
Gambar 3.8	Diagram Indeks Inovasi Daerah Level Provinsi Tahun 2025 ……..	68
Gambar 3.9	Grafik *Trend* Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau …….....	76
Gambar 3.10	Grafik *Trend* IKM Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau ……	83

Gambar 3.11 Grafik Trend Capaian SAKIP Daerah Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja …….. 90

Gambar 3.12 Rumus Perhitungan Indeks Manajemen Risko (MRI) 95

Gambar 3.13 Grafik Capaian Indeks Manajemen Risiko Provinsi Kepulauan Riau ……... 97

Gambar 3.14 Diagram Realisasi Anggaran Tahun 2025 …….. 102

LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan pembangunan, Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk dapat menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel yang ditunjukan melalui performa kinerja guna terciptanya *good governance and clean government* (tata penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik) dengan pilar transparansi, partisipatif dan akuntabilitas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

LKjIP merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bertujuan untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk mencapai *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
5. Tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Tindak lanjut tas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi SAKIP.

TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepualauan Riau diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

TUGAS: Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

FUNGSI

- Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah

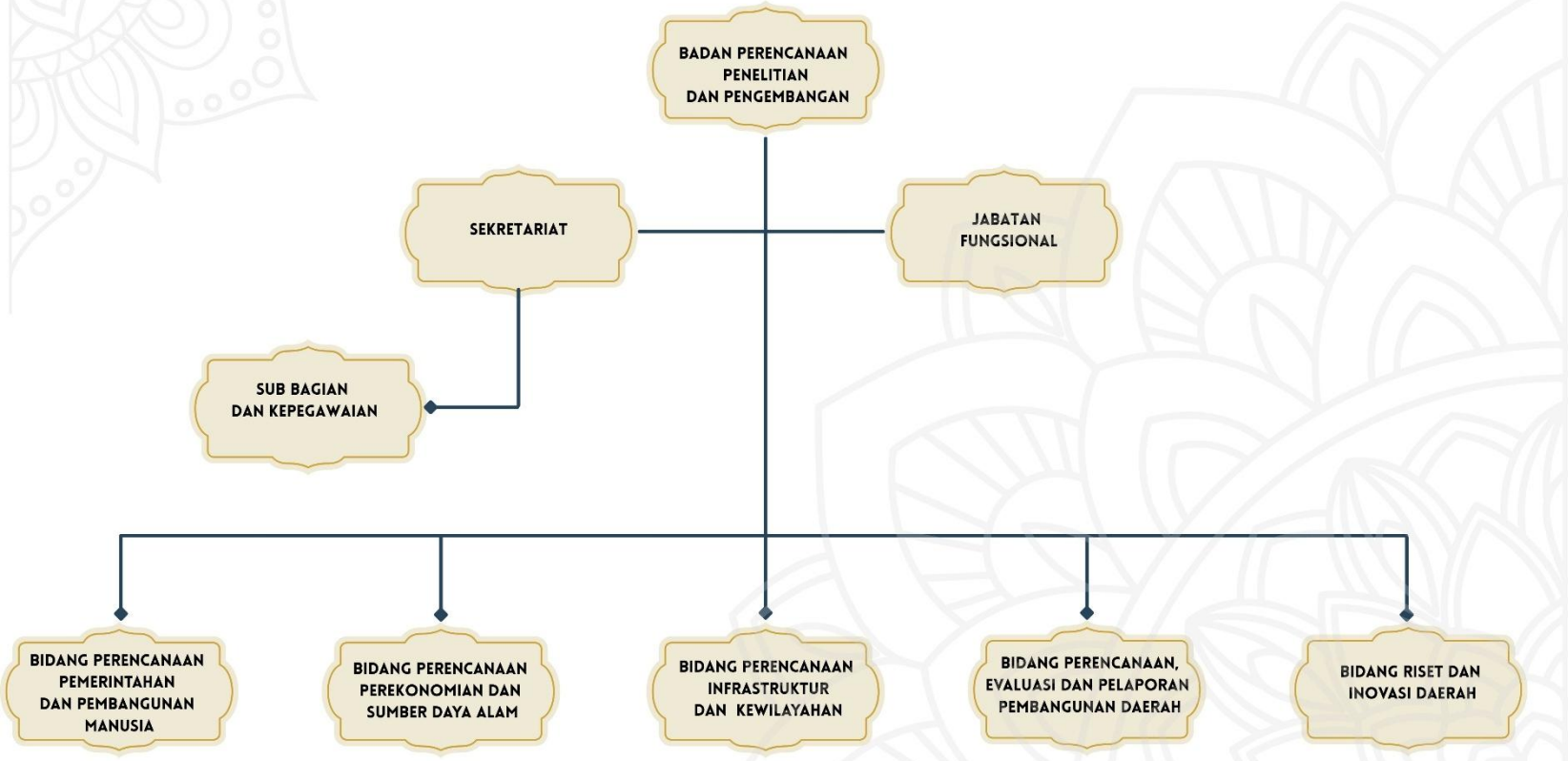

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Uraian tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut;

Sekretariat

T U G A S

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengkoordinasikan bidang-bidang.

F U N G S I

- Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi lingkup perangkat daerah;
- Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang lingkup perangkat daerah;
- Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran lingkup perangkat daerah;
- Penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan lingkup perangkat daerah;
- Penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi lingkup perangkat daerah;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja lingkup perangkat daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- Penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUGAS

Melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga, perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negaramelakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga, perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

FUNGSI

- Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- Pelaksanaan dan menyiapkan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
- Pelaksanaan dan menyiapkan kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengembangan pegawai;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- Penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabaran, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- Penyusunan *job description* seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

TUGAS

Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

F U N G S I

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

TUGAS

Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

.

FUNGSI

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan SDA;

- Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

TUGAS

Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

FUNGSI

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

TUGAS

Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan Pembangunan.

FUNGSI

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan Pembangunan;

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan Pembangunan;
- Pelaksanaan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi pagu indikatif perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi muatan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan laporan capaian pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan, serta merekomendasikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pembangunan daerah Provinsi;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, serta merekomendasikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan penyelarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
- Penyusunan dan pelaksanaan pelaporan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

TUGAS

memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi serta melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyunsunan rencana unduk dan peta jalan pemanjual ilmu pengetahuan dan treknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehgidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

F U N G S I

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- Pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan kabupate Kota di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan kabupate Kota di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Pelaksnaan koordinasi penyusunan data pembangunan daerah di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi terkait;
- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerpakan kebijakan, serta inovasi dan invensi Perangkat Daerah di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, supervise dan konsultasi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknoligi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan serta koordinasi sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian. Pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional

TUGAS DAN FUNGSI

Kelompok Jabatan Funsgsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUMBER DAYA

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah aparatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Per Desember Tahun 2025 berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berjumlah 125 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 76 Orang dan PPPK sebanyak 49 orang. Untuk PNS, terdapat Golongan II (1 orang), Golongan III (63 orang), dan Golongan IV (12 orang). Sementara untuk PPPK terdiri dari Golongan IX (27 orang), Golongan VII (1 orang), Golongan V (19 orang) dan Golongan I (2 orang). Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada level menengah hingga tinggi dalam struktur ASN. Secara rinci dapat dijelaskan pada table dan diagram sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang
Per Desember Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah (orang)
I.	**Pegawai Negeri Sipil (PNS)**	**76**
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	1
3.	Golongan III	63
4.	Golongan IV	12
II.	**Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**	**49**
1.	Golongan I	2
2.	Golongan V	19
3.	Golongan VII	1
4.	Golongan IX	27
	TOTAL	**125**

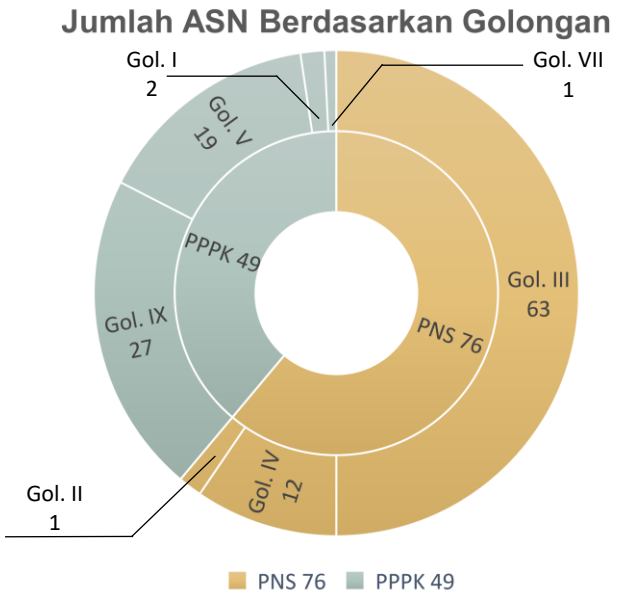

Gambar 1.2
Diagram Persentase Perbandingan Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang dan Per Desember Tahun 2025

Jika dilihat dari latar belakang Pendidikan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh personil dengan kualifikasi pendidikan yang sangat memadai. Mayoritas pegawai merupakan lulusan perguruan tinggi, yaitu sebanyak 66 orang lulusan Sarjana (S1) dan 23 orang lulusan Magister (S2). Selain itu, terdapat 2 orang pegawai dengan latar belakang pendidikan Doktoral (S3), yang memperkuat kapasitas analisis dan perumusan kebijakan organisasi. Secara keseluruhan, pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi (S1 hingga S3) mencakup lebih dari 70% dari total kekuatan personil. Kualifikasi ini didukung pula oleh lulusan Diploma dan jenjang menengah yang berperan penting dalam kelancaran operasional serta administrasi teknis.

Dari sisi kesetaraan gender, komposisi pegawai menunjukkan distribusi yang cukup berimbang, terdiri dari 73 laki-laki dan 52 perempuan. Keseimbangan ini juga terlihat pada jenjang pendidikan tinggi, di mana jumlah laki-laki dan perempuan pada tingkat S1 dan S2 relatif merata. Dengan proporsi perempuan mencapai 41,6% dari total pegawai, organisasi memiliki keragaman perspektif yang mendukung penyusunan perencanaan

pembangunan yang lebih inklusif bagi masyarakat Kepulauan Riau. Secara rinci dapat dijelaskan pada tabel dan diagram sebagai berikut

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan Terakhir	Tahun 2025		
		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	S3	2	-	2
2.	S2	12	11	23
3.	S1	34	32	66
4.	D4	2	1	3
5.	D3	4	2	6
6.	SMA/SMK	17	6	23
7.	SD	2	-	2
Jumlah		**73**	**52**	**125**

Gambar 1.3
Perbandingan Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

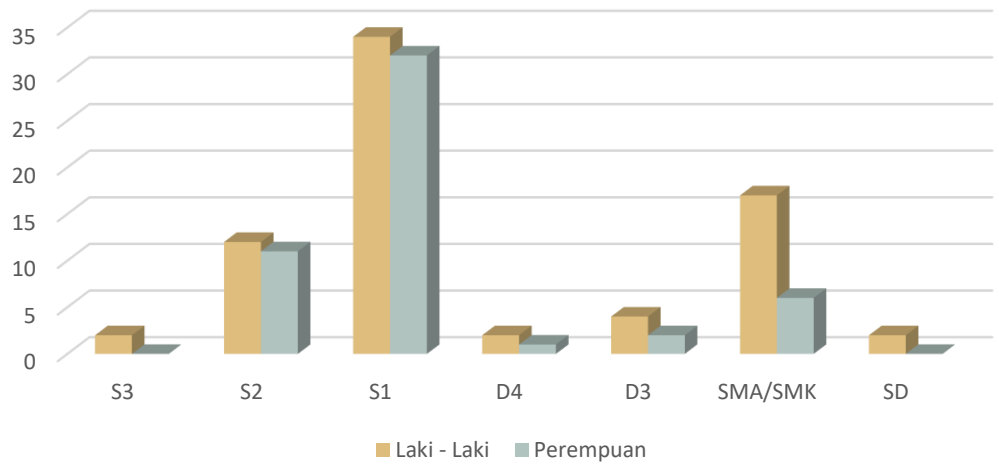

Sementara itu, untuk sebaran jabatan, organisasi memiliki struktur yang komprehensif mulai dari tingkat manajerial hingga fungsional ahli. Jabatan fungsional didominasi oleh tenaga perencana (32 orang) dan analis kebijakan (8 orang) dalam berbagai jenjang keahlian. Keberadaan posisi strategis seperti Peneliti dan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur menunjukkan

bahwa organisasi tidak hanya fokus pada perencanaan teknis, tetapi juga pada pengembangan riset dan tata kelola internal. Komposisi ini menjamin adanya keseimbangan antara fungsi perumusan kebijakan strategis dan dukungan operasional administrative. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan
di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
1.	JPT Pratama	1
2.	Pejabat Administrator	6
3.	Pejabat Pengawas	1
4.	Analis Kebijakan Ahli Utama	2
5.	Perencana Ahli Madya	1
6.	Analis Kebijakan Ahli Muda	4
7.	Perencana Ahli Muda	17
8.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	2
9.	Peneliti Ahli Muda	1
10.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	2
11.	Perencana Ahli Pertama	14
12.	Peneliti Ahli Pertama	1
13.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
14.	Penelaah Teknis Kebijakan	15
15.	Pengolah Data dan Informasi	3
16.	Pranata Komputer Penyelia	1
17.	Pranata Komputer Mahir	1
18.	Fasilitator Pemerintahan	1
19.	Pengadministrasian Perkantoran (PNS)	4
20.	Penata Layanan Operasional	25
21.	Pengelola Layanan operasional (PPPK)	1
22.	Pengadministrasian Perkantoran (PPPK)	19
23.	Pengelola Umum Operasional	2
	TOTAL	**125**

SARANA DAN PRASARANA

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja pembangunan daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Ditinjau dari dukungan sarana prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, didukung beberapa sarana prasarana sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Menurut Kondisi
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

NO	NAMA / JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	TOTAL NILAI PEROLEHAN
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT		
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1.	Mini Komputer	0	0	1	1	14.500.000,00
2.	P.C Unit	52	0	0	52	624.649.076,00
3.	Lap Top	114	0	0	114	1.817.296.782,50
4.	Note Book	23	0	0	23	347.085.639,00
5.	Tablet PC	24	0	0	24	352.171.000,00
6.	Hard Disk	17	0	0	17	25.307.950,00
7.	CPU (Peralatan Mini Komputer)	0	0	1	1	13.250.000,00
8.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	102	0	0	102	326.248.550,00
9.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	0	2	4	22.563.300,00
10.	Peralatan Personal Komputer lainnya(loudspeker)	0	1	0	1	1.290.000,00
11.	Alat Tenis Meja	0	0	2	2	12.000.000,00
12.	Jeep	0	0	1	1	563.000.000,00
13.	Station Wagon	18	0	0	18	4.429.530.670,00
14.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	0	0	1	225.900.000,00
15.	Pick Up	1	0	0	1	159.830.000,00
16.	Sepeda Motor	17	0	0	17	315.428.000,00
17.	Mesin Ketik Listrik	2	0	0	2	14.927.500,00
18.	Mesin Absen (Time Recorder)	2	0	0	2	9.300.000,00

NO	NAMA / JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	TOTAL NILAI PEROLEHAN
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT		
19.	Mesin Penghitung Uang	3	0	0	3	17.980.000,00
20.	Lemari Besi/Metal	1	0	0	1	88.700.000,00
21.	Lemari Kayu	30	0	0	30	575.597.987,00
22.	Filing Cabinet Besi	23	0	0	23	76.000.000,00
23.	Brandkas	2	0	0	2	16.950.000,00
24.	Lemari Kaca	2	0	0	2	8.500.000,00
25.	CCTV - Camera Control Television System	5	0	0	5	19.190.000,00
26.	White Board	0	0	1	1	27.700.000,00
27.	Alat Penghancur Kertas	20	0	0	20	96.173.200,00
28.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	12	0	0	12	73.115.000,00
29.	Alat Kantor Lainnya	0	0	5	5	104.900.000,00
30.	Meja Kerja Kayu	119	0	0	119	677.401.320,00
31.	Meja Rapat	12	0	0	12	84.200.000,00
32.	Meja 1/2 Biro	6	0	0	6	14.460.000,00
33.	Kursi Rapat	81	0	0	81	194.729.000,00
34.	Kursi Putar	123	0	0	123	216.336.100,00
35.	Partisi	10	0	0	10	1.034.478.200,00
36.	Sofa	9	0	0	9	77.900.000,00
37.	Lemari Es	11	0	0	11	25.520.000,00
38.	A.C. Split	38	0	0	38	299.654.028,00
39.	Alat Pendingin lainnya	3	0	0	3	14.994.000,00
40.	Treng Air/Tandon Air	3	0	0	3	14.465.000,00
41.	Televisi	26	0	0	26	447.685.100,00
42.	Mic Conference	29	0	0	29	233.430.000,00
43.	Unit Power Supply	14	0	0	14	45.831.000,00
44.	Camera Video	6	0	0	6	108.400.000,00
45.	Tustel	14	0	0	14	155.064.300,00
46.	Tangga Aluminium	1	0	0	1	6.099.500,00
47.	Dispenser	5	0	0	5	12.945.000,00
48.	Coffee Maker	1	0	0	1	3.500.000,00
49.	Handy Cam	1	1	1	3	30.910.000,00
50.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0	0	42	42	187.600.250,00
51.	Alat Pemadam/Portable	17	0	0	17	22.610.000,00
52.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	0	0	6	10.980.000,00
53.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	0	0	2	14.251.000,00

NO	NAMA / JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	TOTAL NILAI PEROLEHAN
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT		
54.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	0	0	5	12.480.000,00
55.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	0	0	15	35.696.300,00
56.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	0	0	6	11.814.000,00
57.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	6	0	2	8	17.672.000,00
58.	Microphone/Wireless MIC	1	0	0	1	7.000.000,00
59.	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	0	0	1	1	1.318.000,00
60.	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	0	1	3	63.639.000,00
61.	Camera Electronic	1	0	0	1	25.712.000,00
62.	Teleprompter	1	0	0	1	2.200.000,00
63.	Tripod Camera	1	0	0	1	1.600.000,00
64.	Lensa Kamera	3	0	0	3	45.570.000,00
65.	Layar Film/Projector	0	0	1	1	19.700.000,00
66.	peralatan pemancar shf lainnya (dst)	2	0	0	2	9.880.000,00
67.	Alat Kedokteran umum lainnya	2	0	0	2	3.600.000,00
68.	Tripod	2	0	0	2	6.990.000,00
69.	Thermometer Digital Portable	3	0	0	3	3.600.000,00
Grand Total		**796**	**89**	**330**	**1.215**	**14.310.422.804,50**

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan terintegrasi, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dihadapkan pada sejumlah permasalahan strategis yang perlu direspon secara terarah dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan kondisi obyektif yang menjadi dasar penyusunan isu strategis, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, dinamika kebijakan pembangunan daerah dan nasional, serta kebutuhan penguatan peran Bappeda dalam siklus perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang akan menjadi landasan dalam perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, serta program rencana strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Riau:

1) Belum Optimalnya integrasi dan keselarasan perencanaan lintas level pemerintahan

Proses perencanaan pembangunan daerah memerlukan penyelarasan yang lebih optimal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam hal penjabaran prioritas pembangunan, konsistensi program strategis, serta harmonisasi penganggaran. Hal ini penting untuk meningkatkan konsistensi pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

2) Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah

Penerapan prinsip perencanaan berbasis kinerja dan sistem pengukuran yang objektif memerlukan penguatan lebih lanjut. Pencapaian kinerja yang tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya pada komponen perencanaan dan pengukuran, menunjukkan masih adanya ruang perbaikan yang harus direspons

secara sistematis. Selain itu, integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan resiliensi rencana pembangunan.

3) Masih Terbatasnya pelaksanaan dan pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan dan peningkatan daya saing

Peran hasil penelitian dan pengembangan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan perlu diperkuat. Keterkaitan antara litbang, inovasi, dan perencanaan masih berkembang dan memerlukan penguatan ekosistem kolaboratif antar pihak terkait.

Selanjutnya, penentuan isu strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi kelembagaan, permasalahan aktual, serta keterkaitannya dengan isu lingkungan strategis baik pada level global, nasional, maupun regional. Bappeda Provinsi Kepulauan Riau memiliki sejumlah kekuatan, seperti tersedianya dokumen perencanaan lintas *level*, sistem e-SAKIP dan e-*Planning* yang telah berjalan, serta dukungan awal pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Namun, tantangan utama yang dihadapi mencakup belum optimalnya keselarasan perencanaan lintas sektor dan antar level pemerintahan, kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja yang belum merata, serta terbatasnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.

Dalam konteks dinamika global, terdapat tekanan yang semakin kuat terhadap tata kelola pembangunan yang inklusif, akuntabel, dan berbasis hasil, dengan pendekatan yang terintegrasi secara lintas sektor dan lintas level. Agenda internasional seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta tren menuju *knowledge-based economy* dan *agile government* menuntut kapasitas kelembagaan daerah yang adaptif dan berbasis bukti. Di tingkat nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi dan integrasi perencanaan pusat-daerah juga

menjadi kerangka acuan utama, sementara pada tingkat regional, ketimpangan arah pembangunan dan disharmonisasi kebijakan sektoral masih menjadi persoalan yang harus diatasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan dua isu strategis utama yang menjadi pijakan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda, yaitu:

1. **Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah secara konsisten, kolaboratif, dan berbasis bukti dalam rangka mendukung penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah melalui penerapan manajemen risiko.**
2. **Penguatan Kapasitas riset dan inovasi daerah untuk mendukung perencanaan dan pembangunan yang responsive dan berdaya**
3. **saing.**

Tabel 1.5
Pemetaan Isu Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tersedianya dokumen perencanaan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dapat disinergikan Telah dikembangkan kerangka SAKIP dan sistem kinerja berbasis RPJMD di tingkat provinsi	Belum Optimalnya integrasi dan keselarasan perencanaan lintas level pemerintahan Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah Masih Terbatasnya pelaksanaan dan pemanfaatan riset dan inovasi dalam	Tata Kelola Pemerintahan	Tuntutan global terhadap tata kelola pembangunan yang inklusif dan terintegrasi melalui pendekatan *multi-level governance* dan *policy coherence for sustainable development* (PCSD) Meningkatnya tekanan internasional untuk	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;	Ketimpangan arah pembangunan antarwilayah Minimnya harmonisasi kebijakan sektoral di daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah secara konsisten, kolaboratif, dan berbasis bukti dalam rangka mendukung penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah melalui penerapan manajemen risiko Penguatan Kapasitas riset dan inovasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Adanya kolaborasi awal riset daerah dan dukungan SIDa dari pusat Tersedianya sistem perencanaan dan pelaporan internal PD melalui *e*-SAKIP dan *e-Planning* Tersedianya regulasi dan sistem pendukung sinkronisasi pusat-daerah Telah terbentuk forum	mendukung proses perencanaan pembangunan		menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas anggaran publik, dan tata kelola pemerintahan yang transparan (*good governance*) Pergeseran ekonomi global menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan inovasi teknologi sebagai pendorong utama daya saing Standar global mengenai			daerah untuk mendukung perencanaan dan pembangunan yang responsif dan berdaya saing

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
perencanaan lintas bidang (musrenbang, rakor teknis, dll)			transformasi kelembagaan pemerintah yang adaptif, lincah (*agile government*), dan berbasis hasil (*results-based management*) Kebutuhan penyesuaian kebijakan daerah terhadap komitmen global seperti Agenda 2030 (SDGs), perubahan iklim, dan keterpaduan pembangunan lintas negara dan wilayah			

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			Dorongan global untuk pendekatan pembangunan yang lintas sektor, terintegrasi, dan berbasis sistem (*systems thinking*) dalam mengatasi tantangan kompleks pembangunan			

PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

Tahun 2025 merupakan periode transisi penting yang menghubungkan akhir masa perencanaan jangka menengah 2021–2026 dengan awal periode 2025–2029. Pada fase ini, fokus utama diarahkan untuk menuntaskan target-target yang sedang berjalan sekaligus menyusun landasan strategis bagi periode berikutnya. Upaya transisi ini dilakukan guna menjamin kesinambungan program serta memastikan bahwa arah kebijakan baru tetap selaras dengan evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, selanjutnya telah ditetapkan pula Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang merupakan manifestasi komitmen Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Memperhatikan periode perencanaan jangka menengah periode tahun 2021-2026 dan periode tahun 2025-2029, berikut dijabarkan visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.1
Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau

	RPJMD 2021-2026	RPJMD 2025-2029
	Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029
Visi	***"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"***	***"Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata"***
Misi 1	Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah

	RPJMD 2021-2026	RPJMD 2025-2029
Misi 2	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah
Misi 3	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Takwa	Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter;
Misi 4	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
Misi 5	Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai perangkat daerah yang menangani perencanaan daerah memiliki peran dalam mewujudkan misi yaitu:

2021-2026

Misi 2:

"Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan"

2021-2026

Misi 4:

"Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, terbuka, berbasis teknologi informasi dan berorientasi pelayanan".

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut serta keterkaitan Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Penlitian dan Pengembangan secara lengkap dituangkan dalam *Cascade* sebagai berikut:

Tabel 2.2

***Cascading* Visi, Misi, Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD, Tujuan Renstra dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

	PERIODE 2021-2026			PERIODE 2025-2029	
VISI	Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya			Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata	
MISI	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan			Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis teknologi Informasi dan Berorientasi pelayanan	
TUJUAN RPJMD	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital	
SASARAN RPJMD	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	
TUJUAN BAPPEDA	Meningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Riset dan Inovasi Daerah		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	
SASARAN BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko	Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Kolabiratif dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi, tujuan, serta sasaran maka disusun indikator kinerja yang meliputi:

Tabel 2.3
Penetapan Indikator Tujuan dan Sasaran
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

Periode Renstra	Tujuan/Sasaran	Indikator
Renstra 2021-2026	**Tujuan I:**	
	Meningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai Sakip dari aspek perencanaan dan Pengukuran Kinerja
	Sasaran 1:	
	Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan
	Sasaran 2:	
	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan
		Indeks Inovasi Daerah
	Tujuan II:	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Rata-Rata Capaian IKU Bappeda
	Sasaran 3:	
	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappeda
		IKM Bappeda
Renstra 2025-2029	**Tujuan:**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	Predikat SAKIP
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
	Sasaran 1:	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko	SAKIP Daerah Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja
		Indeks Manajemen Risiko (MRI)
	Sasaran 2:	
	Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Kolabiratif dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)

Selanjutnya Tujuan, Sasaran Strategis, indikator kinerja beserta target kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tahun 2021-2026 serta periode Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan keterkaitannya dengan misi pembangunan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.4
Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau
Periode 2021-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Tujuan I **Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Riset dan Inovasi Daerah**	Nilai Sakip dari aspek perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Skor	44,58	47	49	51	
Sasaran I.1 **Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas**	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Sasaran I.2 **Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah**	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan	Na	%	100	100	100	100
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Tujuan II **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda**	Rata-Rata Capaian IKU Bappeda	%	116,20	90	92	94	94
Sasaran II.1 **Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A
	IKM Bappeda	Skor	84,81	90	91	92	92

Tabel 2.5
Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau
Periode 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	-	Predikat SAKIP (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
	-	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	3,40	3,40	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko	SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja (Nilai)	45,93	46,18	46,43	46,68	46,93	47,18	47,43
		Indeks Manajemen Risiko (MRI) (Indeks)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Kolaboratif dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja.

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan jangka menengah, karena itu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Adapun target kinerja Badan Perencanaan, Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Target Kinerja Tahun 2025
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Baik
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan	100
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappeda	A
		IKM Bappeda	91

Untuk mendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mengelola anggaran sebesar Rp. 30.004.751.636,00 yang digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan. keterkaitan antara perencanaan kinerja dan anggaran dengan target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025	
Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai Sakip dari Aspek Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Skor	49	
Sasaran 1.1 Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	Baik	
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	%	90	2.187.243.810,00
	Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	%	93	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Yang Disusun	Dokumen	24	1.769.056.950,00
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	15	110.772.500,00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	54.793.900,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025	
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	123.712.900,00
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	2	327.946.000,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	1.151.831.650,00
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	12.500.000,00
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	12.500.000,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	26	255.686.860,00
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	76.767.460,00
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	21	178.919.400,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	Persen	93	922.221.521,00
	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persen	93	
	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	2	339.593.731,00
	Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	5	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	58.868.400,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	JJumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	35.872.400,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	244.852.931,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	1	302.781.190,00
	Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	2	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	149.809.390,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	55.937.100,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (	Laporan	1	97.034.700,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1	279.846.600,00
	Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	3	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	80.733.200,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	JJumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	41.298.600,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	51.837.500,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	105.977.300,00
Sasaran 1.2: Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan	Persen	100	
	Indeks Inovasi Daerah	Kategori Indeks	Inovatif	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan.	Persen	100	259.582.320,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	2	203.216.960,00
Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	32.515.230,00
Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1	170.701.730,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	1	22.695.730,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	22.695.730,00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan	1	33.669.630,00
Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	33.669.630,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025	
Tujuan 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Rata-Rata Capaian IKU Bappeda	Persentase	92	
Sasaran 2.1: Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai SAKIP	BB	
	IKM Bappeda	Skor	91	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Persen	100	24.748.676.682,00
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Persen	100	151.462.232,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	151.462.232,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	20.739.510.798,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	77	20.126.190.798,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	613.320.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100	51.315.200,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	51.315.200,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	15.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	15.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	856.385.777,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.278.711,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	29.998.416,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	94.160.015,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	91.131.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	63.130.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	59.559.635,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	508.128.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	64.548.100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	64.548.100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.249.848.053,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	12.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	70.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	194.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.973.848.053,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	671.921.722,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	78.757.900,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	325.975.822,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39	32.550.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	234.638.000,00

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Baik
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	100 %
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	91

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 24.709.678.562,00	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evauasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.182.318.270,00	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 816.145.181,00	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 259.582.320,00	APBD

Selanjutnya dengan telah disahkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, **sehingga perlu dilakukan** revisi/perubahan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam lampiran I *point* E pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka telah disusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2025 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran	SAKIP Daerah Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja (Nilai)	46,18

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko	Indeks Manajemen Risiko (MRI) (Indeks)	Level 3
2.	Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Kolaboratif dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)	Inovatif

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 24.589.827.003,00	APBD-P
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evauasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.176.054.010,00	APBD-P
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 943.724.521,00	APBD-P
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 140.053.042,07	APBD-P

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan, Penel itian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau merupakan upaya untuk mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan dan digunakan sebagai dasar untuk menilai suatu pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang ditargetkan untuk dicapai menggunakan rumus berikut:

Rumus Capaian

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right) \times 100\ \%$$

Gambar 3.1
Rumus Capaian Kinerja

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja (CK) Serta Hasil dan Penjelasan

Tabel Skala Pengukuran Capaian Kinerja (Ck) Serta Hasil Dan Penjelasan		
Skala Capaian Kinerja (%)	**Hasil Capaian Indikator Kinerja**	**Penjelasan Skala Capaian Kinerja**
CK**>75**	Sangat Berhasil	Capaian Kinerja Lebih besar dari 75%
50<CK**<75**	Berhasil	Capaian Kinerja diatas 50% sampai dengan Kurang dari 75%

25<CK**<50**	Cukup Berhasil	Capaian Kinerja diatas 25 % sampai dengan Kurang dari 50%
0<CK**<25**	Tidak Berhasil	Capaian Kinerja kurang dari 25%

Adapun capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disampaikan sebagaimana infografis berikut:

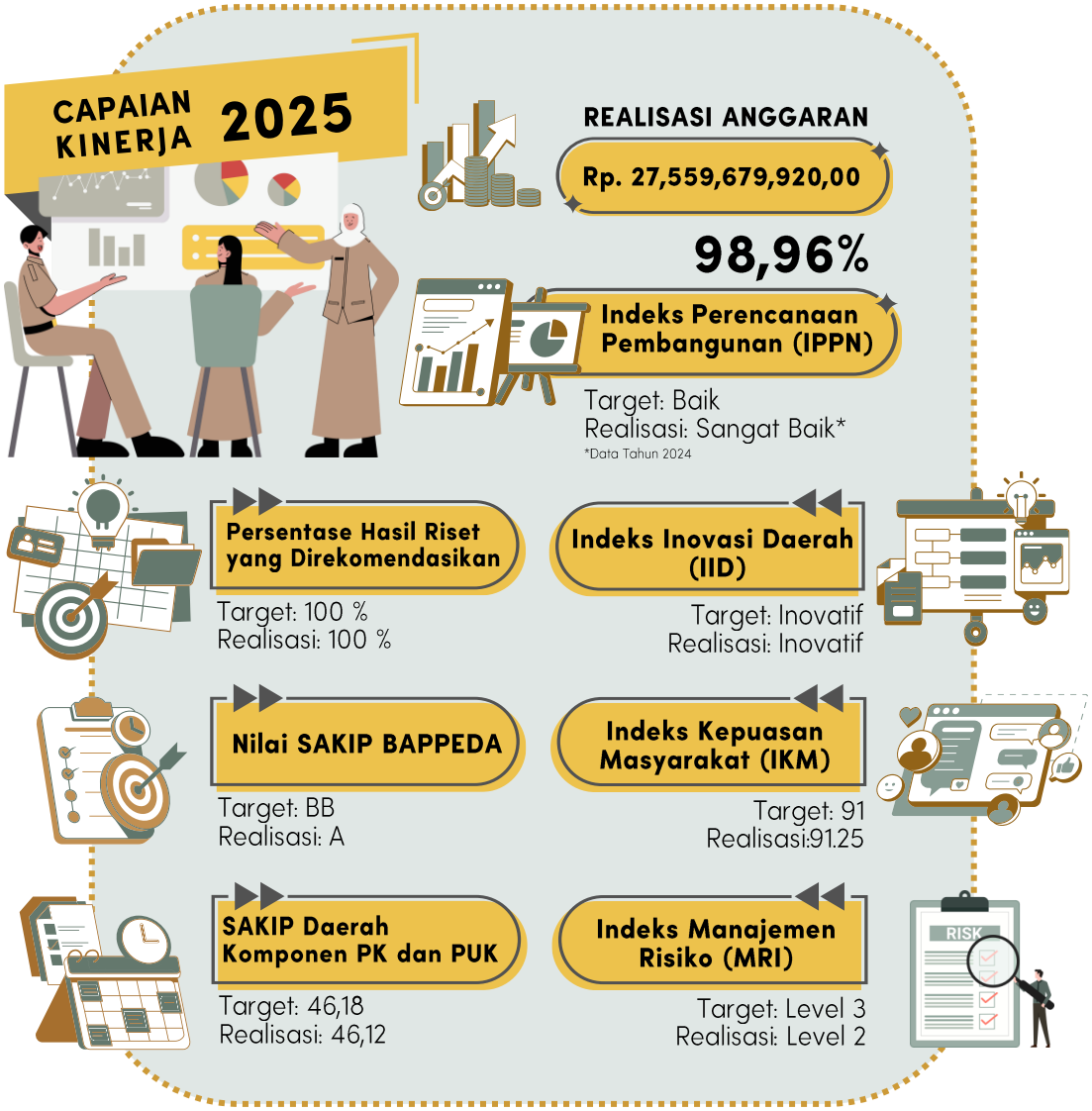

Gambar 3.2
Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Tahun 2025

Secara umum Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan telah berhasil mencapai target kinerja tahun 2025, selanjutnya informasi dan analisis capaian kinerja masing – masing indikator rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Periode Renstra 2021 - 2026				**100,50 %**
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Baik (81,00–90,99)	Sangat Baik (91,24)	100,27%
Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan	100	100	100,00%
	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (40,01 – 65,00)	Inovatif 52,8	100,00%
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappeda	BB (70 – 80)	A (81,76)	102,20 %
	IKM Bappeda	91	91,25	100,27 %
Periode Renstra 2025 - 2029				**95,51 %**
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko	SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja (Nilai)	46,18	46,12	99,87 %
	Indeks Manajemen Risiko (MRI) (Indeks)	Level 3 (3,000 - 3,999	Level 2 (2,600)	86,67%
Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Kolaboratif dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)	Inovatif (40,01 – 65,00)	Inovatif 52,8	100,00%

SASARAN:
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN)

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Provinsi adalah penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk mengukur kualitas hasil perencanaan Pemerintah Provinsi yang merupakan total dari seluruh nilai masing-masing komponen yakni sinergi, kualitas perencanaan, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja.

Hasil penilaian IPPN Pemerintah Provinsi diberi predikat dengan mengacu pada indikator predikat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023. Pemeringkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3
Indikator Predikat Kualitas Perencanaan Berdasarkan Hasil Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi

Rentang Nilai	Predikat
91,00 – 100,00	Sangat Baik
81,00 – 90,99	Baik
71,00 – 80,99	Cukup Baik
61,00 – 70,99	Kurang
≤	Sangat Kurang

Tabel 3.4
***Resume* Capaian Kinerja IPPN**

CAPAIAN 2025:

SANGAT TINGGI

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya			
Tahun	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2023	Baik	Baik (83,82)	100,00 %
2024	Baik	Sangat Baik 91,24)	100,27 %
2025	Baik	Sangat Baik 91,24)*	100,27 %

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026		
Realisasi 2025	**Target Akhir Periode renstra**	**Capaian Kinerja**
Sangat Baik 91,24)*	Baik	100,27 %

Perbandingan dengan Capaian Rata-Rata Nasional	
Realisasi 2025	**Rata – Rata Nasional**
Sangat Baik (91,24)*	Sangat Baik

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas belum merilis hasil penilaian atas Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Provinsi Tahun 2025. Namun berdasarkan hasil penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2025, secara umum, kualitas kinerja Dokumen Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau sudah baik tetapi masih perlu terus ditingkatkan. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sendiri adalah penghargaan yang diberikan pemerintah pusat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Secara teknis antara Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) memiliki irisan yang terletak pada penggunaan data dasar yang saling memperkuat, terutama dalam menilai kualitas dokumen perencanaan. Pertama, keduanya memiliki kesamaan parameter dalam mengukur keselarasan kebijakan (*alignment*); integrasi antara RKPD, RPJMD, dan RPJMN menjadi indikator krusial di mana capaian tinggi pada aspek konsistensi di PPD secara linear akan merefleksikan skor yang positif pada aspek keselarasan di IPPN.

Selanjutnya, PPD dan IPPN mengadopsi pendekatan berbasis hasil (*outcome-based*) dengan menggunakan indikator makro, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, sebagai instrumen validasi. Dalam hal ini, PPD

memotret keberhasilan capaian tersebut, sementara IPPN menggunakannya untuk menguji efektivitas proses perencanaan dalam mendukung target nasional. Terakhir, kedua instrumen ini menyinergikan aspek inovasi dan reformasi, di mana program unggulan yang dinilai secara kualitatif dalam PPD menjadi bukti konkret bagi IPPN dalam mengukur keberhasilan transformasi tata kelola dan reformasi birokrasi di daerah.

adapun secara rinci hasil penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau dijelaskan melalui diagram berikut:

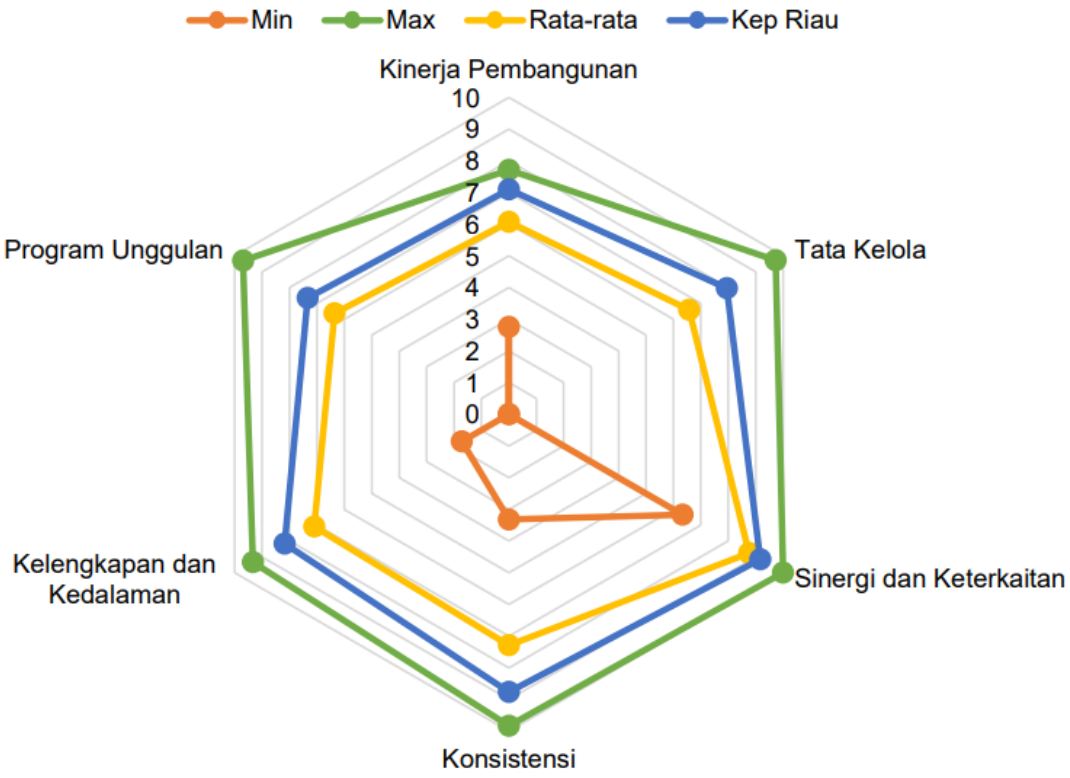

Gambar 3.3
Diagram Hasil Penilaian Dokumen PPD 2025
Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan *spider web* diagram hasil penilaian dokumen Provinsi Kepulauan Riau terlihat bahwa beberapa indikator penilaian yang mendapat nilai di atas rata-rata yaitu indikator kinerja pembangunan, kinerja tata kelola, kinerja isnergi dan keterkaitan, indikator konsistensi, indikator kelengkapan

dokumen dan indikator program unggulan. Sementara itu, indikator yang mendapatkan nila di bawah rata – rata adalah indikator kinerja pembangunan, yakni terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Berikutnya akan dijelaskan informasi/ analisa Capaian Kinerja IPPN sebagai berikut:

1 Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, IPPN ditargetkan pada kategori Baik. Namun dengan belum dirilisnya hasil penilaian IPPN 2025, maka digunakan hasil penilaian Tahun 2024 sebagai realisasi yakni pada kategori Sangat Baik (91,24).

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi	Baik (81,00–90,99)	Sangat Baik (91,24)	100,27 %

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2024

Berdasarkan *trend* capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun, serta potret dari hasil penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 dapat dilihat bahwa kualitas perencanaan Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya, lebih jelas ditunjukkan melalu tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.6
***Trend* Perkembangan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Keterangan
	2023	2024	2025	
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi	83, 82 (Kategori Baik)	91, 24 (Kategori Sangat Baik)	91, 24* (Kategori Sangat Baik)	Meningkat

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2024

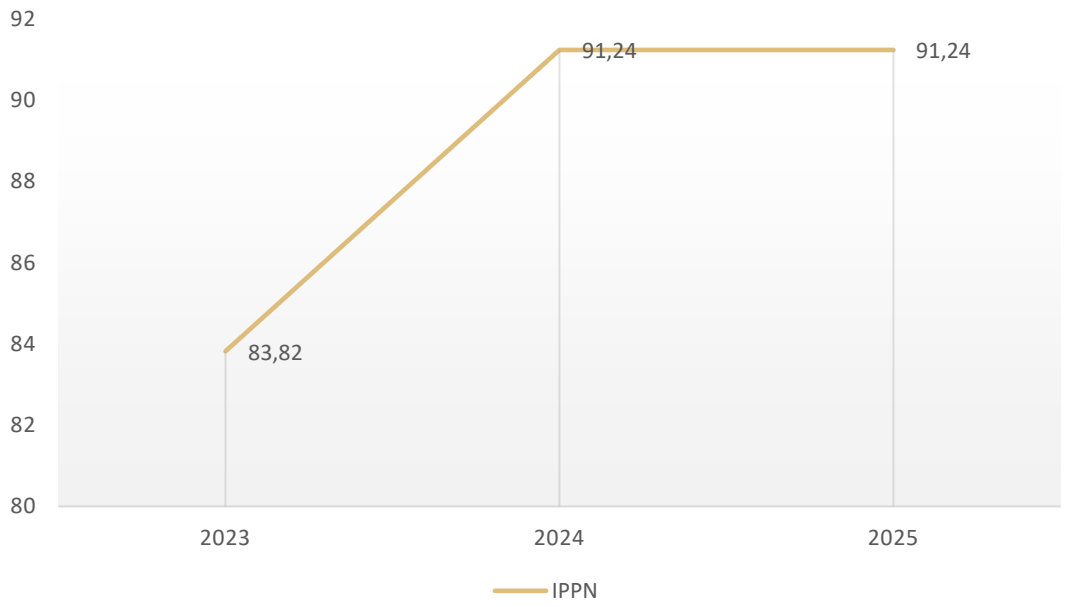

Gambar 3.4
Grafik Perkembangan IPPN Provinsi Kepulauan Riau

2 Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021 - 2026

Tahun 2025 merupakan tahun ke 3 sejak dilaksanakannya penilaian IPPN oleh Kementerian PPN/Bappenas dan tahun terakhir penerapan Perubahan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-

2026. Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode dan terhadap target akhir renstra merupakan salah satu tolok ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021- 2026 adalah sebagai berikut

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2021 - 2026

Indikator Kinerja	Realisasi	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi	Sangat Baik (91, 24)	Baik (81,00 – 90,99)	100,27 %

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja IPPN Provinsi kepulauan Riau telah melebihi target yang ditetapkan pada target akhir periode Renstra 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik.

3 Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi	Rata-Rata Nasional	Keterangan
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi	Sangat Baik	Sangat Baik	Sama Dengan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2024

Hingga saat laporan ini disusun, Kementerian PPN/ Bappenas belum merilis hasil penilaian IPPN Tahun 2025. Berdasarkan data terakhir (penilaian Tahun 2024) Provinsi Kepulauan Riau mendapat predikat Sangat Baik (91,24). Dalam hal ini predikat yang dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau selaras atau sama dengan predikat IPPN Nasional sebagaimana yang tertuang pada LKJIP Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2024.

4 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja

Dengan melihat *trend* perkembangan capaian kinerja IPPN serta memperhatikan hasil penilaian PPD Tahun 2025, secara umum, kinerja perencanaan Provinsi Kepulauan Riau sudah baik. Keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau didorong oleh dominasi indikator yang melampaui rata-rata, bahkan beberapa di antaranya mencapai nilai maksimum (skor tertinggi) yakni:

1. Capaian Indikator Makro yang Unggul

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai nilai maksimum dan berada di atas rata-rata. Pada tahun 2025, IPM Provinsi Kepulauan Riau mengalami graduasi dari kategori Tinggi menjadi Sangat Tinggi atau berhasil menduduki peringkat tertinggi untuk wilayah Sumatera dan peringkat 3 Nasional. Indikator Ekonomi yakni Pertumbuhan ekonomi, inklusivitas, pengentasan kemiskinan, dan penanganan ketimpangan juga menunjukkan kinerja yang solid di atas rata-rata.
2. Tata Kelola dan Transparansi

   Provinsi Kepuauan Riau Memiliki kinerja yang baik dalam pelayanan publik, akuntabilitas, pengelolaan keuangan, serta penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
3. Sinergi dan Konsistensi Perencanaan

   Pemetaan Kebijakan sangat kuat dalam menyelaraskan kebijakan RKPD 2025 dengan visi-misi RPJMD (mencapai nilai maksimum).
4. Konsistensi Program

Adanya keselarasan yang sangat tinggi antara prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas yang ditetapkan.

5. Kerangka Pendanaan

   Penyusunan kerangka ekonomi dan proyeksi pendanaan dalam RKPD dinilai sangat mendalam dan mencapai nilai maksimum.

6. Inovasi Daerah

   Program unggulan yang diajukan dinilai memiliki kelengkapan dokumen yang baik dan relevan dengan sasaran pertumbuhan tinggi berkelanjutan

Adapun Upaya yang dilakukan dalam mendukung berhasilnya capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan

Tahun 2025 merupakan transisi periode perencanaan. Dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025 – 2029 serta RKPD, untuk memastikan kualitas dan keselarasan dokumen tersebut, adapun yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Pendampingan/ asistensi intensif kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan serta *cascading* kinerja, indikator kinerja dan target kinerja. Hal ini Untuk memastikan keselarasan Dokumen Perencanaan Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

Rapat Koordinasi Verifikasi Renstra Tahun 2025 – 2029 bersama Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Desk Pembahasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada Musrenbang RKPD

b. Badan Perencanaan Penlitian dan Pembangunan membangun koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Pusat dalam upaya memastikan keselarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Pusat khususnya dukungan/ kontribusi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Asta Cita serta penyelarasan target indikator Makro

Konsultasi rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 -2029 bersama Kementerian Dalam Negeri

Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 bersama Kementerian Dalam Negeri

c. Mendorong dan optimalisasi keterlibatan berbagai pihak/ *stakeholder* dalam proses perencanaan untuk memperkaya masukan dalam penyusunan dokumen perencaan Diantaranya melalui pelaksanaan konsultasi publik dan Musrenbang.

Konsultasi Publik RKPD Provinsi Kepulauan Riau

Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau

2. Penguatan Fungsi Pengendalian dan Evaluasi

Bappeda Provinsi Kepulauan Riau secara berkala melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah untuk mengukur pencapaian kinerja per triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, memastikan konsistensi

antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan, mengukur konsistensi antara RKPD dengan RPJMD serta melihat kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. **Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perencana**

   Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau memahami bahwa peran Perencana yang memenuhi standar kompetensi sangat krusial dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang handal dan kredibel. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM Perencana tersebut, dilaksanakan *Coaching Clinic* Penyusunan Rencana Strategis.

***Coaching Clinic* Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 bersama**

Dalam upaya mencapai target kinerja IPPN, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan target khususnya indikator makro antara pemerintah pusat dan daerah. Optimisme target nasional yang cukup tinggi menjadi kendala di daerah karena karakteristik di daerah yang beragam.
2. Belum optimalnya pemanfaatan dan keterkaitan *outcome* inovasi dalam perencanaan pembangunan
3. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kegiatan prioritas nasional

5 Upaya Perbaikan/ Peningkatan Kinerja

Dalam rangka upaya peningkatan dan perbaikan kinerja, hal-hal dilakukan untuk mendukung keberhasilan capaian IPPN kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi intensif dengan mitra Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat dan *Stakeholder* dalam rangka penyelarasan Renja Perangkat daerah dengan RKPD, RKPD dengan RKP, RPJMD dan RPJMN.
2. Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di Daerah.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan yang berbasis data dan riset
4. Intensifikasi pengendalian, pemantauan dan evaluasi berkala serta penerapan Manajemen Risiko
5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Aparatur Perencanaa melalui berbagai media pembelajaran

SASARAN:
Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah

- Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan
- Indeks Inovasi daerah (IID)

Hasil riset yang direkomendasikan untuk digunakan dalam rumusan kebijakan pembangunan daerah

Seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. IID merupakan skor komprehensif yang mencerminkan:

1. Ketersediaan Regulasi dan Anggaran yang mendukung ekosistem inovasi.
2. Kecepatan dan Kualitas proses penciptaan dan penerapan inovasi.
3. Kemanfaatan inovasi bagi peningkatan pelayanan publik, pembangunan, dan daya saing daerah.

Riset dan inovasi memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah karena menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan berbasis bukti *(evidence-based-policy).* Ketersediaan data dan informasi yang akurat memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, relevan, dan efektif. Selain itu, riset berfungsi dalam mengidentifikasi permasalahan serta peluang pembangunan, sehingga program dan kegiatan yang dirancang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan komitmen yang kuat dalam penguatan pelaksanaan riset daerah sebagai bagian dari upaya membangun kebijakan pembangunan berbasis riset. Berbagai kajian telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjawab permasalahan strategis daerah dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat. Oleh karena itu, salah satu indikator kinerja utama yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan adalah Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator tersebut dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah hasil riset yang direkomendasikan masuk dalam RKPD}}{\text{Jumlah Riset}} \times 100$$

Gambar 3.5
Rumus Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan

Selanjutnya inovasi memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Inovasi mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi waktu maupun biaya. Berdasarkan Pasal 386 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inovasi diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah. Lebih lanjut, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa Tujuan pelaksanaan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) diukur dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pembaharuan (*Novelty*)
2. Manfaat
3. Kepentingan Publik
4. Urusan Dan Kewenangan Pemda
5. Replikasi/Aplikatif

Lebih lanjut, kriteria penilaian ini dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ ke - i$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ ke-i\right) Inovasi\ Ke\ j}{MAX(10,n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$$

$$Skor\ Total = SPD + SID$$

$$IID = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum}\ x\ 100$$

Keterangan:

n adalah jumlah inovasi daerah
i adalah nomor indikator
j adalah nomor inovasi
SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah
SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 3.6
Rumus Perhitungan Indeks Inovasi Daerah (IID)

Kategori capaian Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) adalah sebagai berikut:

1. Tidak Dapat Dinilai untuk Indeks Inovasi Daerah = 0
2. Kurang Inovatif untuk Indeks Inovasi Daerah 00,01 sampai dengan 40,00
3. Inovatif untuk Indeks Inovasi Daerah 40,01 sampai dengan 65,00

Sangat Inovatif untuk Indeks Inovasi Daerah 65,01 sampai dengan 100,00

Tabel 3.9
***Resume* Capaian Kinerja Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan dan Indeks Inovasi Daerah (IID)**

CAPAIAN 2025:

Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan

100%

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	N/a	N/a	N/a
2024	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026		
Realisasi 2025	Target Akhir Periode renstra	Capaian Kinerja
100%	100%	100%

Perbandingan dengan Capaian Rata-Rata Nasional	
Realisasi 2025	Rata – Rata Nasional
100%	N/a

Indeks Inovasi Daerah (IID)

100%

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	N/a	Inovatif (43,83)	N/a
2024	Inovatif	Inovatif (50,33)	100%
2025	Inovatif	Inovatif (52,85)	100%

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026		
Realisasi 2025	Target Akhir Periode renstra	Capaian Kinerja
Inovatif	Inovatif	100%

Perbandingan dengan Capaian Rata-Rata Nasional	
Realisasi 2025	Rata – Rata Nasional
Inovatif	Inovatif

1 Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Hasil penilaian capaian kinerja pada urusan penelitian dan pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) “Persentase Hasil Riset yang DI rekomendasikan” mendapat total nilai sebesar 100 persen, persentase capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada IKU PD “Indeks Inovasi Daerah” mendapatkan nilai sebesar 52,85 (kategori

Inovatif), capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terwujudnya rumusan kebijakan pembangunan dari hasil riset dan inovasi daerah	Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan	100%	100%	100%
	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (35,00-60,00)	Inovatif (52,85)	100%

Sumber: BSKDN Kemendagri 2025

Komitemen Proviinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan pengambilan keputusan berbasis bukti *(evidence-based-policy)* dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan *trend* peningkatan khususnya indikator Indeks Inovasi daerah (IID) yang terus naik setiap tahun sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.11
***Trend* Perkembangan Realisasi dan Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Keterangan
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan	N/a	100%	100%	N/a
Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (43,83)	Inovatif (50,33)	Inovatif (52,85)	Meningkat

Sumber: BSKDN Kemendagri 2025

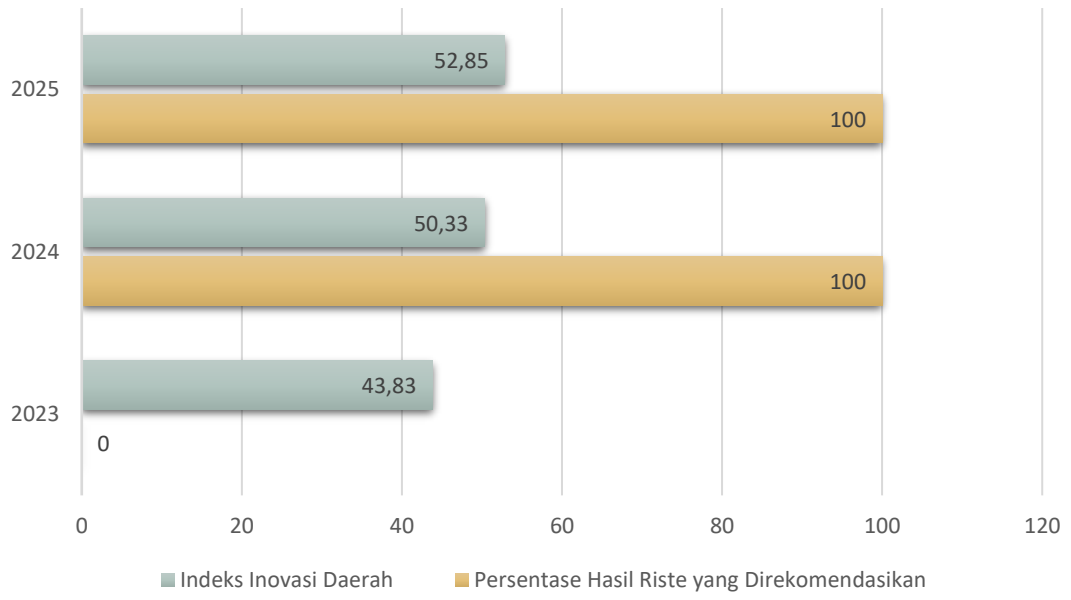

Gambar 3.7
Grafik Peningkatan Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan

2 Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021 - 2026

Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode dan terhadap target akhir renstra merupakan salah satu tolok ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan	100%	100%	100 %

Indikator Kinerja	Realisasi	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (52,85)	Inovatif (35,00-60,00)	100%

Sumber: BSKDN Kemendagri 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan pada target akhir periode Renstra 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas urusan Penelitian Dan Pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau sudah lebih baik.

3 Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Adapun perbandingan capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan capaian rata - rata nasional disajikan pada tabel dan diagram, berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
dengan Rata-Rata Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-Rata Nasional	Keterangan
Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan	100%	N/a	N/a
Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Sama Dengan

Sumber: BSKDN Kemendagri 2025

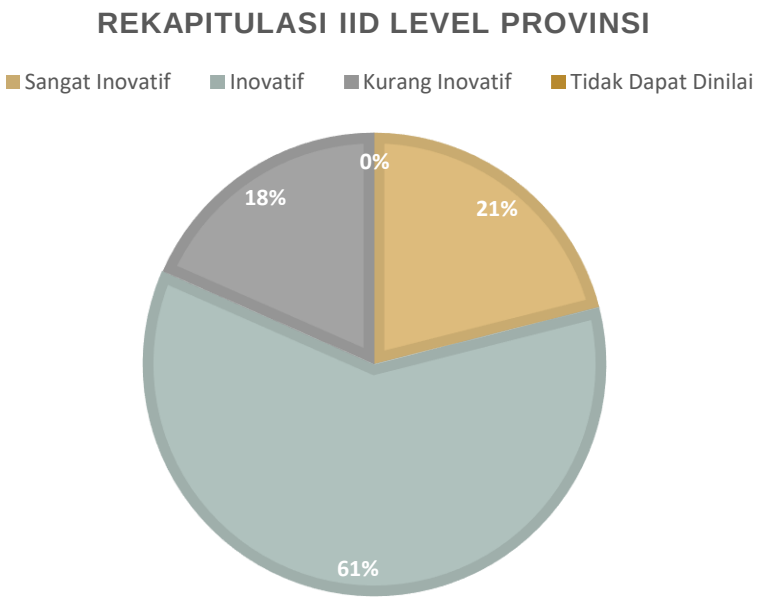

Gambar 3.8
Diagram Indeks Inovasi Daerah Level Provinsi Tahun 2025

Berdasarkan data tabel dan digram diatas, dapat terlihat bahwa Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sama dengan capaian rata-rata nasional yakni berada pada kategori inovatif.

4 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja

Keberhasilan capaian indikator kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan "Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan" serta "Indeks Inovasi Daerah" di Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil kerja keras seluruh *stakeholder* untuk menghasilkan dokumen-dokumen kelitbangan Tahun 2025 yang berkualitas andal dan kredibel serta selaras/sejalan dengan kebijakan urusan penelitian dan pengembangan. Beberapa faktor lain sebagai yang mendukung keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam mengakses data dan sumber informasi pendukung kelitbangan terutama data sektoral daerah melalui aplikasi e walidata.
2. Koordinasi dan Komunikasi yang aktif dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat dalam upaya memastikan keselarasan dan keterpaduan urusan penelitian dan pengembangan.
3. Adanya partisipasi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak/*stakeholder* dalam proses riset dan inovasi untuk memperkaya masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Rapat dengan Mitra Bestari untuk persiapan penerbitan Jurnal Archipalego

4. Asistensi dalam mengoptimalkan dan mendorong pihak-pihak terkait untuk menghasilkan berbagai inovasi.

Sosialisasi dan Pengayaan Inovasi pada Perangkat Daerah pada Optimalisasi Partisipasi dalam Kelitbangan dan Inovasi

5. Fasilitasi dalam proses pelaporan inovasi di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

6. Secara konsisten menyediakan wadah publikasi ilmiah sebagai media diseminasi hasil riset bertema kepulauan yang diterbitkan secara berkala sebanyak dua kali dalam satu tahun.

7. Penguatan dukungan kebijakan/ regulasi dalam pelaksanaan inovasi melalui ditetapkannya Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/100.3.4/1/BPPP-SET/2025 tetnag Pelaksanaan Gerakan Satu Instansi Menghasilkan Satu Inovasi di Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah.

Dalam capaian urusan penelitian dan pengembangan, diakui masih mendapat hasil yang kurang memuaskan antara lain disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan riset yang masih belum optimal karena belum dapat terlaksana secara konsisten setiap tahun. Hasil riset yang diperoleh saat ini masih bersumber dari hasil karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh Jurnal *Archipelago* milik Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Budaya inovasi belum mengakar sebagai budaya kerja yang berbasis *Services Excellent* dan kreativitas dalam menghadapi tantangan.

3. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kegiatan riset dan inovasi.
4. Kapasitas SDM terkait dengan kemampuan mengoperasionalkan teknologi penerbitan jurnal dan *prosiding* secara *online*, *website* serta *domain* yang masih memerlukan penyesuaian.

4 Upaya Perbaikan/ Peningkatan Kinerja

Dalam rangka upaya perbaikan, hal hal yang dapt dilakukan untuk memperkuat posisi sebagai salah satu provinsi paling inovatif di tingkat nasional yaitu:

1. Pengayaan terhadap konsep inovasi bagi Perangkat Daerah agar dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat dan berkelanjutan.
2. Mendorong percepatan penerapan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pengembangan inovasi berbasis digital.
4. Peningkatan koordinasi lintas Perangkat Daerah melalui forum rutin juga dapat memastikan sinergi yang lebih baik dalam menciptakan dan mengintegrasikan inovasi.
5. Pendampingan intensif bagi Perangkat Daerah yang menghadapi kendala dalam melengkapi data dukung inovasi.

SASARAN:
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NILAI SAKIP BAPPEDA

Merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menekankan pentingnya akuntabilitas transparansi, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah di Indonesia. SAKIP mendorong setiap instansi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan mereka secara sistematis. Dengan adanya SAKIP, diharapkan instansi pemerintah dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, mencapai tujuan pembangunan secara efektif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk itu, Nilai SAKIP menjadi salah satu indikator sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Penilaian atas SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan rentang hasil penilaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
Rentang Nilai SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh Kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisien (*reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
2	A	>80 -90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan,

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			serta akuntabel pada seluruh unti kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, mauipun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan Mukai terwujud efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator
4	B	>60 - 70	Baik. Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khusunya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja sera komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2/ unit kerja
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
6	C	>30 - 50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja kurang dapat diandalkkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
7	D	0 - 30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya mendadar khusunya dalam implementasi SAKIP

Tabel 3.15
***Resume* Capaian Kinerja SAKIP**
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

CAPAIAN 2025:

A
MEMUASKAN

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya			
Tahun	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2023	BB (>70 – 80)	BB (76,05)	100%
2024	BB (>70 – 80)	BB (79,70)	100%
2025	BB (>70 – 80)	A (81,76)	102,27%

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026		
Realisasi 2025	**Target Akhir Periode renstra**	**Capaian Kinerja**
A (81,76)	A (>80-90)	100%

Perbandingan dengan Capaian Rata-Rata Nasional	
Realisasi 2025	**Rata – Rata Nasional**
A (81,76)	N/a

1 Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dari kriteria yang dijelaskan di atas, hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebesar 81,76 yang menunjukkan kategori peringkat **A (MEMUASKAN)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari penilaian dari komponen manajemen kinerja yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Hasil Penilaian Komponen SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi 2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,80

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi 2025
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,84
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,63
4	Evaluasi Internal	25,00	18,50
	Total	100,00	81,76

Sumber: LHE SAKIP 2025

Adapun Capaian kinerja indikator sasaran Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB (>70 – 80)	A (81,76)	102,27%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan *trend* data capaian kinerja Nilai SAKIP, terdapat peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2022, Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 73,51 (Predikat BB), meningkat menjadi 76,05 (Predikat BB) pada Tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 79,70 (Predikat BB) pada Tahun 2024. Selanjutnya, pada Tahun 2025 capaian Nilai SAKIP berhasil mencapai 81,76 dengan Predikat A.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada periode 2022–2024 masih berada dalam rentang predikat BB, secara kuantitatif terjadi peningkatan nilai yang signifikan setiap tahunnya. Puncaknya pada Tahun

2025, target peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja berhasil dicapai dengan memperoleh Predikat A. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.18
***Trend* Peningkatan Realisasi dan Capaian Kinerja SAKIP**
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Keterangan
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Nilai SAKIP	BB (73,51)	BB (76,05)	BB (79,70)	A (81,76)	Meningkat

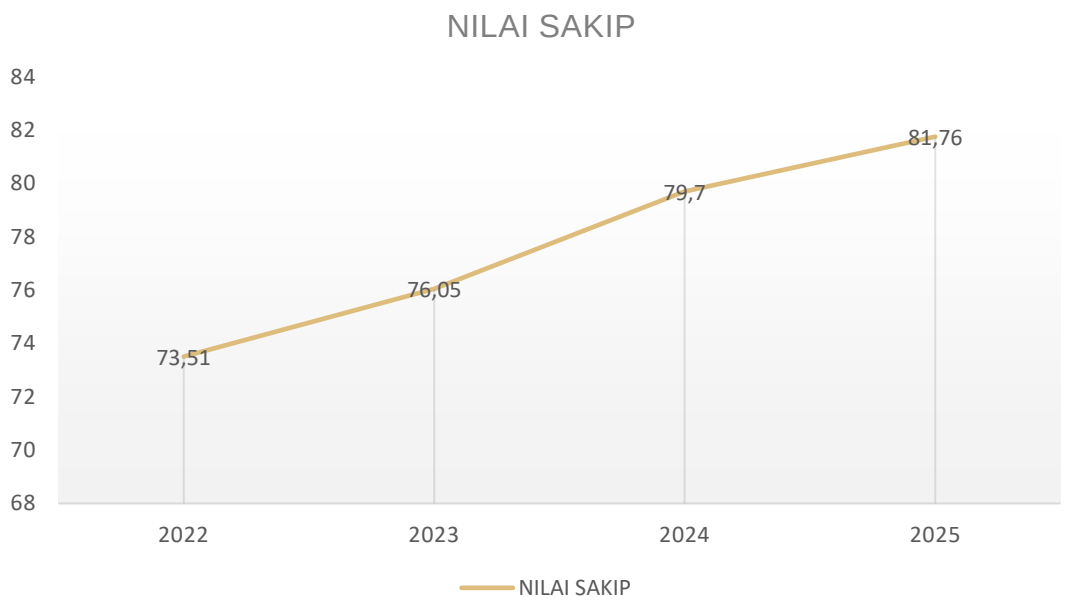

Gambar 3.9
Grafik *Trend* Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

2 Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021 - 2026

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan telah menetapkan target Nilai SAKIP dengan Predikat A pada akhir periode Renstra 2021–2026.

Dengan capaian Tahun 2025 yang telah berada pada Predikat A (81,76), secara substansial target akhir periode telah tercapai lebih awal. Namun demikian, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	A (81,76)	A (>80 - 90)	100 %

3 Faktor Pendukung Keberhasilan Ketercapaian Realisasi Kinerja

Dari pengukuran terhadap capaian kinerja indikator sasaran Nilai SAKIP, menunjukkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau telah melebihi target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan yang Matang

   Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Urusan Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau senantiasa berupaya menyusun perencanaan yang baik, termasuk analisis situasi perumusan strategi yang efektif, dan identifikasi target yang realistis disertai indikator yang terukur.

2. Evaluasi Kinerja yang Berkesinambungan

   Sistem *monitoring* dan evaluasi atas capaian rencana aksi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan membuat penyesuaian saat diperlukan. Ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan situasi dan perbaikan kontinu dalam pencapaian kinerja.

3. Pelaporan yang Transparan. Penyampaian laporan kinerja yang akurat dan tepat waktu kepada publik dan pemangku kepentingan serta Penyusunan laporan yang mudah dipahami dan komprehensif.

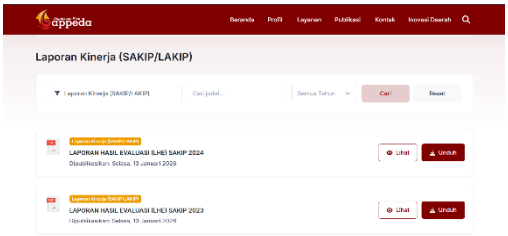

4. Ketersediaan Sumber Daya yang Memadai.

   Keberhasilan pencapaian kinerja juga terkait dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan didukung oleh Jabatan Fungsional dari level pertama hingga utama yang cukup memadai yang memungkinkan untuk terwujudnya perencanaan yang baik, termasuk pemetaan risiko,

5. Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

   Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas terhadap penggunaan sumber daya merupakan faktor penting. Komitmen terhadap transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko penyimpangan atau penyalahgunaan kebijakan. Selain itu adanya kepemimpinan yang kuat dalam memberikan arah, dorongan dan dukungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Penandatanagan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

4 Upaya Perbaikan/ Peningkatan Kinerja

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan Implementasi SAKIP di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi Penyelarasan (*Cascading*)

   Memperkuat hubungan yang berkesinambungan antara sasaran di tingkat organisasi hingga ke level individu agar seluruh pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap tujuan utama instansi.
2. Memperkuat sistem dan mekanisme pengumpulan data kinerja agar data yang dihasilkan semakin relevan dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja untuk efisiensi dan transparansi.
4. Memastikan hasil pengukuran kinerja menjadi dasar yang konsisten dalam pemberian *reward* dan *punishment.*

5. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Internal

Melakukan evaluasi internal yang memberikan dampak nyata pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi secara keseluruhan

SASARAN:
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang diberikan oleh instansi pemerintah dimana nilai IKM digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tabel 3.20
***Resume* Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya			
Tahun	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2023	82	84,81	103,42%
2024	90	90,093	100,10%
2025	91	91,25	100,27%

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026		
Realisasi 2025	**Target Akhir Periode renstra**	**Capaian Kinerja**
91,25	92	97,18%

Perbandingan dengan Capaian Rata-Rata Nasional	
Realisasi 2025	**Rata – Rata Nasional**
91,25	N/a

CAPAIAN 2025:

91,25

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara unit pelayanan publik. Survei dilakukan terhadap **60 (enam puluh) responden** yang merupakan mitra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 3.21
Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	Nilai Rata-Rata Tertimbang/ Pertanyaan	Nilai Rata-Rata Unsur Terimbang	Kategori
Persyaratan	216	0,400	3,600	Sangat Baik
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	240	0,444	4,000	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	214	0,396	3,633	Sangat Baik
Biaya/Tarif	240	0,444	4,000	Sangat Baik
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	212	0,393	3,533	Sangat Baik
Kompetensi Pelaksana	219	0,406	3,650	Sangat Baik
Perilaku Pelaksana	213	0,394	3,567	Sangat Baik
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	191	0,354	3,367	Baik
Sarana dan Prasarana	210	0,389	3,500	Sangat Baik
HASIL TOTAL	**91,25**			**Sangat Baik**

Sumber: Bappeda Kepri 2025

1 Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan ditargetkan sebesar 91 atau kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian IKM Tahun 2025 sebesar 91,25 dengan capaian kinerja sebesar 100,27% sebagaimana ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	91 (Kategori Sangat Baik)	91,25 (Kategori Sangat Baik)	100,27 %

Sumber: Bappeda Kepri 2025

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Keterangan
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	84,81 (Kategori Baik)	90,093 (Kategori Sangat Baik)	91,25 (Kategori Sangat Baik)	Meningkat

Sumber: Bappeda Kepri 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan, terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dari periode sebelumnya ke tahun 2025. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar unsur pelayanan telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih jelas ditunjukkan melalui grafik berikut:

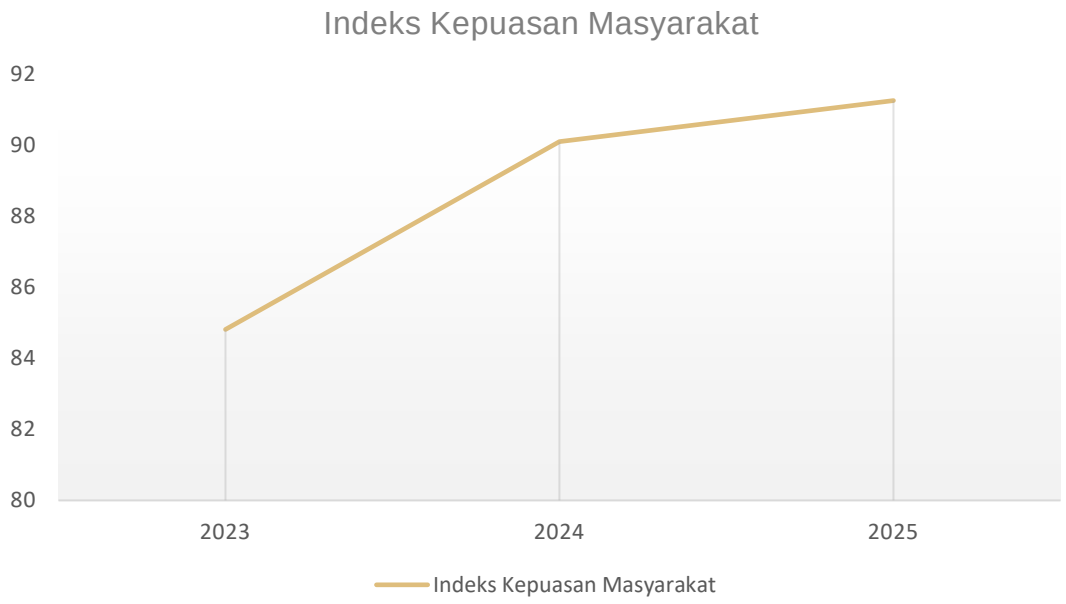

Gambar 3.10
Grafik *Trend* IKM Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

2 Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021 - 2026

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dapat disampaikan bahwa meskipun target akhir belum sepenuhnya tercapai, unit pelayanan telah hampir memenuhi standar yang direncanakan dalam Renstra. Dengan capaian ini, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau hanya perlu melakukan sedikit peningkatan pada aspek yang masih memerlukan perbaikan, terutama unsur “penanganan pengaduan, saran, dan masukan”, yang masih dalam kategori "Baik".

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	91,25 (Kategori Sangat Baik)	92 (Kategori Sangat Baik)	97,18%

3 Faktor Pendukung Keberhasilan dalam Realisasi Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 telah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, hal ini ditunjukkan dari beberapa faktor yang mendukung keberhasilan antara lain yaitu:

1. Kompetensi dan Profesionalisme

   Petugas pelayanan memiliki keterampilan dan sikap profesional yang mendukung kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan.

Pelayanan Konsultasi dan Permintaan dana Informasi Bappeda

2. Proses dan Prosedur yang Jelas

Standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan sudah diterapkan dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan proses layanan yang efisien.

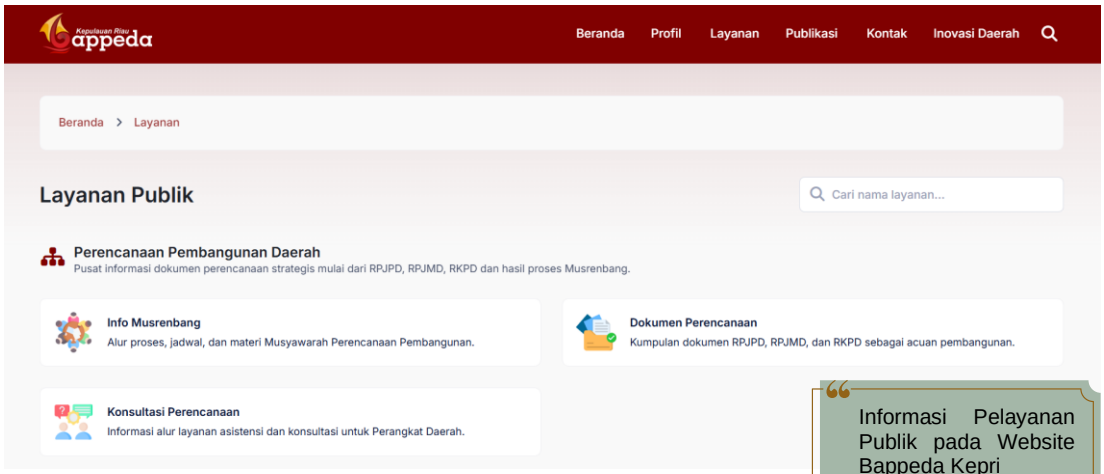

Informasi Pelayanan Publik pada Website Bappeda Kepri

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung pelayanan telah berfungsi dengan baik dan menunjang efektivitas pelayanan publik. Diversifikasi Kanal Pengaduan juga sudah diterapkan baik kotak pengaduan secara fisik maupun digital melalui SP4N Lapor serta diberbagai platform digital lainnya.

Fasilitas Ruang Tunggu Bappeda

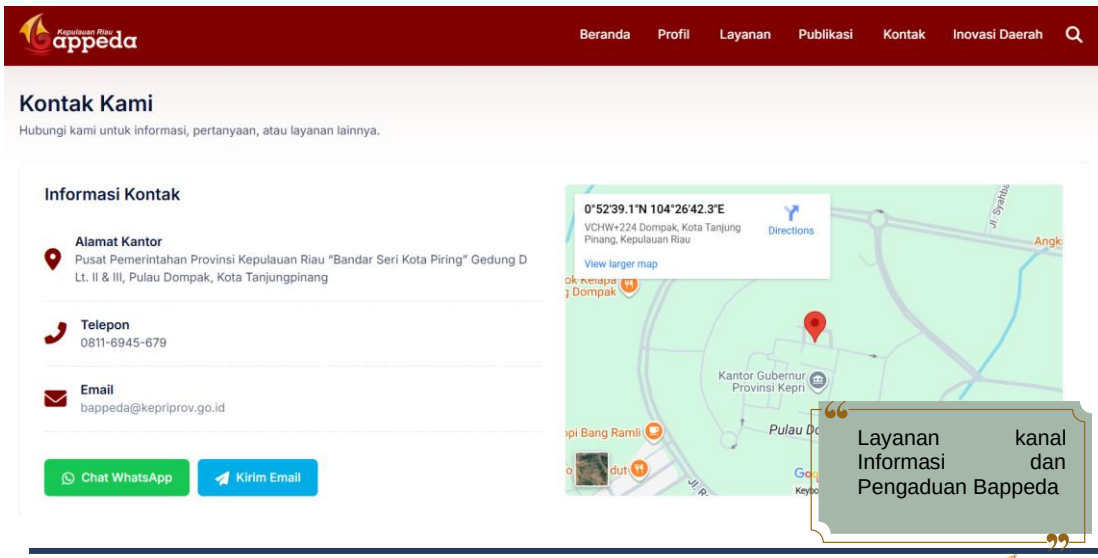

Layanan kanal Informasi dan Pengaduan Bappeda

4. Komitmen terhadap Peningkatan Layanan

   Adanya evaluasi rutin dan tindak lanjut terhadap hasil survei menunjukkan bahwa instansi memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan mutu pelayanan.

4 Upaya Perbaikan/ Peningkatan Kinerja

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas layanan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM Pelayanan, Walaupun secara umum unsur kompetensi dan perilaku pelaksana telah memperoleh nilai sangat baik, peningkatan kapasitas SDM tetap diperlukan sebagai langkah preventif. Pembinaan dapat dilakukan melalui pelatihan pelayanan prima, komunikasi efektif, serta manajemen pengaduan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga konsistensi mutu pelayanan serta meningkatkan sensitivitas aparatur terhadap kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

SASARAN:

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko

SAKIP Daerah Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Kriteria atau rumusan yang digunakan untuk menguku memberikan predikat terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu instansi pemerintah pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Tujuan utama SAKIP adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan perencanan, mengemban tanggung jawab atas aspek perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dalam SAKIP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Tabel 3.25
Bobot Nilai Komponen SAKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00
4	Akuntabilitas Kinerja	25,00
	Total	100,00

Tabel 3.26
***Resume* Capaian Kinerja Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja**

CAPAIAN 2025:

46,12

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya			
Tahun	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2023	N/a	44,61	-
2024	N/a	45,93	-
2025	46,18	46,12	99,87 %

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2029		
Realisasi 2025	**Target Akhir Periode renstra**	**Capaian Kinerja**
46,12	47,43	97,24 %

Perbandingan dengan Capaian Rata-Rata Nasional	
Realisasi 2025	**Rata – Rata Nasional**
46,12	N/a

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan nilai sebesar 78,35 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Adapun untuk komponen Perencanaan Kinerja mendapat nilai sebesar 26,06 sementara komponen pengukuran Kinerja mendapatkan nilai sebesar 20,06 sehingga total kedua komponen tersebut menjadi 46,12. Secara lengkap, rincian hasil evaluasi AKIP khususnya komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.27
Capaian Kinerja SAKIP Daerah Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko	SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	46,18	46,12	99,87 %

Sumber: Kementerian PANRB 2025

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, nilai SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja ditargetkan sebesar 46,18. Berdasarkan hasil evaluasi untuk kedua komponen tersebut, Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai sebesar 46,12. Terdapat selisih sebesar 0,6 dari nilai yang ditargetkan. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 0,73 dari 45,93 menjadi 46,12. Peningkatan nilai SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.28
***Trend* Realisasi dan Capaian SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Keterangan
	2023	2024	2025	
SAKIP Daerah komponen	44,61	45,93	46,12	Meningkat

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Keterangan
	2023	2024	2025	
Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja				

Sumber: Kementerian PANRB 2025

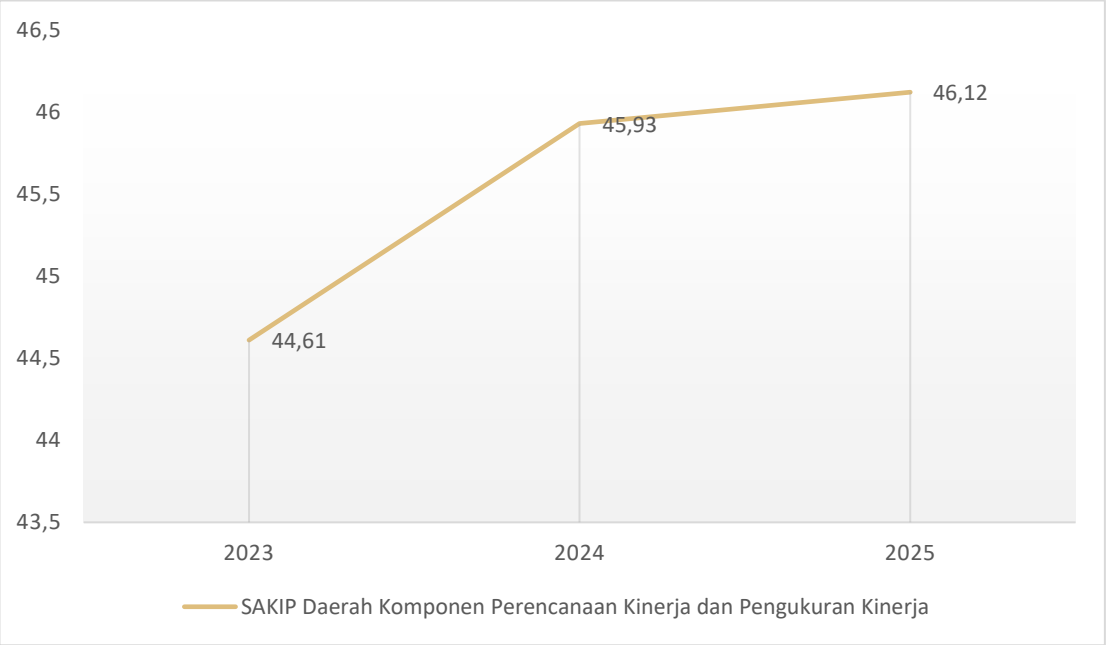

Sumber: Kementerian PANRB 2025

Gambar 3.11
Grafik *Trend* Capaian SAKIP Daerah Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja

2 Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2029

Tahun 2025 merupakan periode peralihan antara Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, dan merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2025 -2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi dan Capaian SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Realisasi	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	46,12	47,43	97,24 %

Sumber: Kementerian PANRB 2025

3 Faktor Pendukung Keberhasilan / Penghambat Capaian Realisasi Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, nilai SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja ditargetkan sebesar 46,18. Berdasarkan hasil evaluasi untuk kedua komponen tersebut, Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai sebesar 46,12 dengan rincian untuk komponen Perencanaan Kinerja mendapat nilai sebesar 26,06 sementara komponen pengukuran Kinerja mendapatkan nilai sebesar 20,06. Adapun faktor pendukung serta penghambat ketercapaian komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
2. Memverifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang salah satunya mengarahkan sasaran strategis dan IKU Perangkat Daerah agar berorientasi hasil dan tepat menjadi kinerja utama kepala Perangkat Daerah terutama pada Perangkat Daerah yang memerlukan perbaikan sesuai catatan pada hasil sementara evaluasi SAKIP TW II Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

Rapat Koordinasi Verifikasi Renstra Tahun 2025 – 2029 bersama Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

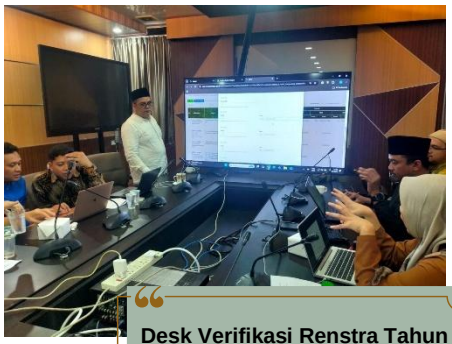

Desk Verifikasi Renstra Tahun 2025 – 2029 bersama Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

3. Memperkuat kesinambungan kinerja antar Level Jabatan melalui Perjanjian Kinerja
4. Mengarahkan Perangkat Daerah untuk menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 sesuai amanat Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi SAKIP.
5. Memperkuat Rencana Aksi Perangkat Daerah
6. Mengarahkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Tahun 2025 sesuai format pada Pergub Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 terutama pada Perangkat Daerah yang memerlukan perbaikan sesuai catatan pada hasil sementara evaluasi SAKIP TW II Tahun 2025 oleh Kemenpan RB Republik Indonesia.
7. Memperkuat Upaya Pengukuran Rencana Aksi Perangkat Daerah
8. Mengarahkan Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Tahun 2025 sesuai format pada Pergub Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 terutama pada Perangkat Daerah yang memerlukan perbaikan sesuai catatan pada hasil sementara evaluasi SAKIP TW II Tahun 2025 oleh Kemenpan RB Republik Indonesia.

Upaya lainnya yang mendukung keberhasilan SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja yakni dengan penguatan Aplikasi e-SAKIP Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan melalui pengembangan ulang aplikasi e-SAKIP Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dimanfaatkan sesuai Pergub Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024. Selain itu kerangka struktur kerja juga dibuat ulang sebagai model yang perlu diimplenetasikan dalam Apikasi e-SAKIP.

Permasalahan yang dihadapi dan yang menjadi kendala dalam mencapai target SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja) adalah:

1. Tantangan Penyusunan Rencana Aksi Perangkat Daerah

   Rencana aksi perangkat daerah belum secara komprehensif mengimplementasikan Pergub Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 dalam menggambarkan upaya (program/kegiatan/sub-kegiataN/aksi) yang mendukung pencapaian sasaran, disertai dengan besaran anggarannya.

2. Tantangan Upaya Pengukuran Rencana Aksi Perangkat Daerah

   Upaya monev rencana aksi pada sebagian perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Monev Rencana Aksi belum sepenuhnya menggambarkan progres realisasi triwulan dari aksi yang dilakukan.

4 Upaya Perbaikan/ Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja serta mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja yang Berkesinambungan Antar Level Jabatan

Memverifikasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan memperhatikan kesinambungan melalui dialog antar level jabatan serta amanat Pergub Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi SAKIP.

2. Penyusunan Rencana Aksi Perangkat Daerah.

   Memverifikasi penyusunan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan memperhatikan amanat Pergub Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi SAKIP guna menggambarkan upaya (program/kegiatan/sub-kegiataN/aksi) yang mendukung pencapaian sasaran, disertai dengan besaran anggarannya..

3. Pengukuran Rencana Aksi Perangkat Daerah.

   Mengukur Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sesuai amanat Pergub Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi SAKIP guna menggambarkan progres realisasi triwulan dari aksi yang dilakukan.

SASARAN:

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan manajemen Risiko

Indeks Manajemen Risiko (MRI)

Indeks Manajemen Risiko merupakan Instrumen pengukuran yang menggambarkan kualitas dan tingkat kematangan (maturitas) penerapan manajemen risiko pada suatu instansi pemerintah

Indeks Manajemen Risiko merupakan Hasil Penilaian BPKP yang diintegrasikan dengan penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Perhitungannya merupakan Agregat dari bobot penilaian pada beberapa komponen utama, yaitu:

1. Struktur dan Kebijakan: Keberadaan dan kualitas dokumen, panduan, serta struktur organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko.

2. Proses Inti: Kualitas pelaksanaan tahapan manajemen risiko, mulai dari penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, hingga penanganan risiko (melalui *Risk Register*).
3. Hasil (Outcome): Kontribusi nyata penerapan MR terhadap pencapaian tujuan dan sasaran instansi, termasuk efektivitas penanganan risiko.

$$MRI = \sum (\text{Nilai Komponen}_i \times \text{Bobot Komponen}_i)$$

Gambar 3.12
Rumus Perhitungan Indeks Manajemen Risko (MRI)

Tabel 3.30
***Resume* Capaian Kinerja Indeks Manajemen Risiko (MRI)**

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya			
Tahun	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2023	N/a	Level 3 (3,098)	-
2024	N/a	Level 3 (3,047)	-
2025	Level 3 (3,000 s.d. 3,999)	Level 2 (2,600)	86,67 %

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026		
Realisasi 2025	**Target Akhir Periode renstra**	**Capaian Kinerja**
Level 2 (2,600)	Level 3	86,67 %

Perbandingan dengan Capaian Rata-Rata Nasional	
Realisasi 2025	**Rata – Rata Nasional**
Level 2 (2,600)	Level 2

CAPAIAN 2025:

Level 2

Indeks Manajemen Risiko diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi level tersebut menunjukkan kualitas penerapan Manajemen Risiko yang semakin baik. Pada Tahun 2025, badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menetapkan target MRI pada level 3. Namun berdasarkan hasil Penilaian MRI oleh BPKP, Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,600 atau memenuhi karakteristik MRI pada Level 2 (*Repeatable*). Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum

sepenuhnya mampu mendefinisikan kinerja dan strategi pencapaian. kinerjanya dengan baik. Pemda telah memiliki kerangka penerapan manajemen risiko dan penyelenggaraan manajemen risiko, namun desain kebijakan dan implementasinya belum memadai. Berikut akan dijelaskan informasi/Analisa capaian kinerja Indeks Manajemen Risiko (MRI).

1 Perbandingan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indeks Manajemen Risiko ditetapkan sebagai salah satu indikator sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Maka indikator tersebut tertuang pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan target dan realisasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Indeks Manajemen Risiko
Tahun 2025

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Level 3 (3,000 - 3,999)	Level 2 (2,600)	86,67 %

Sumber: BPKP Provinsi Kepri 2025

Jika dibandingkan dengan capaian tahun – tahun sebelumnya, capaian MRI tahun 2025 dapat dikatakan mengalami penurunan yang digambarkan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Indeks Manajemen Risiko
Provinsi Kepulauan Riau per Tahun

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Indeks Manajemen Risiko (MRI)	3,098 (Level 3)	3,047 (Level 3)	2,600 (Level 2)

Sumber: BPKP Provinsi Kepri 2025

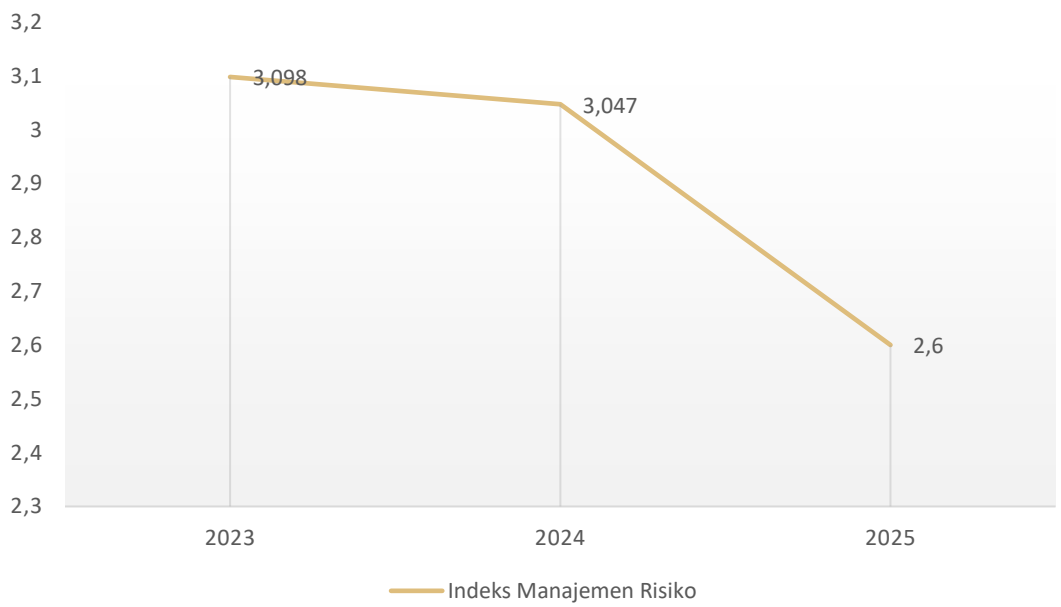

Sumber: BPKP Provinsi Kepri 2025

Gambar 3.13
Grafik Capaian Indeks Manajemen Risiko Provinsi Kepulauan Riau

2 Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2029

Tahun 2025 merupakan periode peralihan antara Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, dan merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2025 -2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Manajemen Risiko Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Level 2 (2,600)	Level 3 (3,000 - 3,999)	86,67 %

Sumber: BPKP Provinsi Kepri 2025

3 Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Tabel 3.34
Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025

NO.	Provinsi	SPIP Terintegritas Tahun 2025	
		MRI	
		SKOR	LEVEL
1	Provinsi Aceh	2.969	2
2	Provinsi Sumatra Utara	2.824	2
3	Provinsi Sumatra Barat	2.800	2
4	Provinsi Riau	2.419	2
5	Provinsi Jambi	N/a	N/a
6	Provinsi Bengkulu	N/a	N/a
7	Provinsi Sumatra Selatan	N/a	N/a
8	Provinsi Lampung	3.073	3
9	Provinsi DKI Jakarta	2.591	2
10	Provinsi Jawa Barat	3.216	3
11	Provinsi Jawa Tengah	2.902	2
12	Provinsi DI Yogyakarta	3.031	3
13	Provinsi Jawa Timur	3.389	3
14	Provinsi Kalimantan Barat	N/a	N/a
15	Provinsi Kalimantan Tengah	N/a	N/a
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2.997	2
17	Provinsi Kalimantan Timur	2.975	2
18	Provinsi Sulawesi Utara	N/a	N/a
19	Provinsi Sulawesi Tengah	N/a	N/a
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	N/a	N/a
21	Provinsi Sulawesi Selatan	2.703	2
22	Provinsi Bali	2.991	2

NO.	Provinsi	SPIP Terintegritas Tahun 2025	
		MRI	
		SKOR	LEVEL
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.659	2
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.909	2
25	Provinsi Maluku	2.494	2
26	Provinsi Papua	N/a	N/a
27	Provinsi Papua Barat	N/a	N/a
28	Provinsi Kepulauan Riau	2.600	2
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.159	3
30	Provinsi Banten	2.928	2
31	Provinsi Gorontalo	2.708	2
32	Provinsi Sulawesi Barat	N/a	N/a
33	Provinsi Maluku Utara	N/a	N/a
34	Provinsi Kalimantan Utara	3.078	3
35	Provinsi Papua Tengah	N/a	N/a
36	Provinsi Papua Selatan	N/a	N/a
37	Provinsi Papua Pegunungan	N/a	N/a
38	Provinsi Papua Barat Daya	N/a	N/a

Sumber: BPKP Provinsi Kepri 2025

Berdasarkan Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025, rekapitulasi terhadap 38 pemerintah provinsi di Indonesia, capaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,600 menempatkan Provinsi Kepulauan Riau pada Level 2 (Berkembang). Sementara capaian rata-rata nasional untuk kategori pemerintah provinsi, yang mana secara akumulatif berada pada kisaran 2,845 yang juga berada pada rentang level 2. Angka tersebut menunjukkan bahwa tata kelola risiko di Kepri masih berada sama dengan performa rata-rata nasional, namun masih terdapat selisih sebesar 0,245 poin dari rata-rata tersebut.

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Manajemen Risiko Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi	Rata-Rata Nasional	Keterangan
Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Level 2 (2,600)	Level 2 (2,845)	Sama Dengan

Sumber: BPKP 2025

4 Faktor Penghambat Ketercapaian Realisasi Kinerja

Pada tahun 2025, Indeks Manajemen Risiko ditargetkan pada level 3. Namun berdasarkan hasil penilaian Manajemen Risiko oleh BPKP, meskipun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki kerangka penerapan manajemen risiko, nilai MRI tertahan di **Level 2 (2,600)**. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah:

1. Kebijakan Belum Komprehensif

   Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan melalui Peraturan gubernur Nomor 65 Tahun 2022 Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun Kebijakan Manajemen Risiko yang ada belum memuat strategi *antifraud* serta belum mengatur mekanisme evaluasi, dan belum memiliki petunjuk teknis (juknis) yang rinci.
2. Struktur Organisasi Belum Optimal

   Belum terbentuk Tim Pengelola Risiko di masing-masing OPD, serta belum ada sekretariat untuk Koordinator Manajemen Risiko, Komite Risiko, dan Unit Kepatuhan.
3. Proses Belum Terintegrasi

   Manajemen risiko belum melekat sepenuhnya pada proses bisnis utama dan belum ada pemantauan (monitoring) berkala atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
4. Kapasitas SDM Terbatas

   Upaya pembinaan belum menjangkau SDM pada fungsi teknis secara optimal.

5 Upaya Perbaikan/ Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP, berikut adalah rincian *Area of Improvement* (AoI) yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan nilai MRI menuju Level 3 (Terdefinisi):

1. Penguatan Kebijakan dan Instrumen Manajemen Risiko.

   Melengkapi regulasi melalui penyusunan SK agar manajemen risiko memiliki panduan yang komprehensif.

   - Strategi Antifraud: Menyertakan strategi pencegahan kecurangan dalam kebijakan manajemen risiko.
   - Petunjuk Teknis (Juknis): Menyusun juknis rinci mengenai jadwal proses, format pemantauan (*monitoring*), dan standar pelaporan risiko di tingkat OPD maupun pemerintah daerah.
   - Mekanisme Evaluasi: Mengatur prosedur evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko secara berkala.
2. Penguatan Struktur dan Tata Kelola Manajemen Risiko
3. Integrasi Proses Bisnis dan Pengambilan Keputusan dan melaksanakan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan mencatat keterjadian risiko secara memadai.

   Pengembangan Kapasitas SDM dan Budaya Risiko melalui sosialisasi serta forum/ media belajar lainnya.

Meskipun Indeks Manajemen Risiko merupakan indikator yang baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan efektif berjalan pada November 2025, namun Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam penerapan manajemen risiko di Provinsi Kepulauan Riau. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau telah memulai koordinasi dan komunikasi aktif dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk bersama memberikan sosialisasi dan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam menerapkan Manajemen Risiko serta membangun budaya risikoi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PENDUKUNG DAN REALISASI ANGGARAN

Untuk memastikan tercapainya seluruh target dari indikator sasaran, pada tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengelola Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 27.849.658.577,00 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.019.501.259,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.766.052.318,00 serta Belanja Modal sebesar Rp 64.105.000,00. Dari total pagu anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 27.559.679.920,00 atau sebesar 98,96%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian target. Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Realisasi Anggaran dapat dilihat pada diagram dan tabel berikut:

Gambar 3.14
Diagram Realisasi Anggaran Tahun 2025

`

Tabel 3.36
Realisasi Keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu Anggaran
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	27.849.658.577,00	27,559,679,920,00	98.96,	289,978,657,00
1	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.176.054.010,00	2.133.795.679,00	98.06,	42.258.331,00
1.1.	Penyusunan Perencanaan Pendanaan	1.772.456.950,00	1.735.405.725,00	97.91	37.051.225,00
1.1.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	114.172.500,00	112.650.533,00	98.67	1.521.967,00
1.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	54.793.900,00	53.558.000,00	97.74	1.235.900,00
1.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	123.712.900,00	122.202.500,00	98.78	1.510.400,00
1.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	327.946.000,00	318.802.983,00	97.21	9.143.017,00
1.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.151.831.650,00	1.128.191.709,00	97.95	23.639.941,00
1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah	12.500.000,00	12.176.325,00	97.41	323.675,00
1.2.1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah	12.500.000,00	12.176.325,00	97.41	323.675,00
1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	391.097.060,00	386.213.629,00	98.75	4.883.431,00
1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	226.767.460,00	223.217.009,00	98.43	3.550.451,00
1.3.2	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	164.329.600,00	162.996.620,00	99.19	1.332.980,00
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	943.724.521,00	918.526.286,00	97.33	25.198.235,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu Anggaran
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	359.596.731,00	339.555.577,00	94.43	20.041.154,00
2.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.727.400,00	56.607.800,00	98.06	1.119.600,00
2.1.2	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.279.400,00	14.018.500,00	91.75	1.260.900,00
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	286.589.931,00	268.929.277,00	93.84	17.660.654,00
2.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	302.781.190,00	300.957.484,00	99.40	1.823.706,00
2.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	208.564.030,00	208.370.193,00	99.91	193.837,00
2.2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	55.937.100,00	55.314.504,00	98.89	622.596,00
2.2.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	38.280.060,00	37.272.787,00	97.37	1.007.273,00
2.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	281.346.600,00	278.013.225,00	98.82	3.333.375,00
2.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, ROJMD dan RKPD)	80.733.200,00	79.666.550,00	98.68	1.066.650,00
2.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	41.298.600,00	40.593.150,00	98.29	705.450,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu Anggaran
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				
2.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.837.500,00	51.116.250,00	98.61	721.250,00
2.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hamonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	107.477.300,00	106.637.275,00	99.22	840.025,00
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	140.053.042,00	129.083.433,00	92.17	10.969.609,00
3.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	79.187.682,00	96.672.723,00	122.08	-17.485.041,00
3.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	32.515.230,00	31.433.500,00	96.67	1.081.730,00
3.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	46.672.452,00	44.974.498,00	96.36	1.697.954,00
3.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	27.195.730,00	20.264.725,00	74.51	6.931.005,00
3.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	27.195.730,00	20.264.725,00	74.51	6.931.005,00
3.3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	33.669.630,00	32.410.710,00	96.26	1.258.920,00
3.3.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	33.669.630,00	32.410.710,00	96.26	1.258.920,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.589.827.004,00	24.378.274.522,00	99.14	211.552.482,00
4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.751.300,00	153.689.109,00	99.31	1.062.191,00
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.751.300,00	153.689.109,00	99.31	1.062.191,00
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.572.701.259,00	21.409.292.787,00	99.24	163.408.472,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu Anggaran
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.019.501.259,00	20.866.488.787,00	99.27	153.012.472,00
4.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	553.200.000,00	542.804.000,00	98.12	10.396.000,00
4..3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.100.000,00	26.600.000,00	98.15	500.000,00
4.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.100.000,00	26.600.000,00	98.15	500.000,00
4.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	812.598.922,00	794.497.176,00	97.77	18.101.746,00
4.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.278.711,00	10.036.953,00	97.65	241.758,00
4.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.499.596,00	15.162.600,00	97.83	336.996,00
4.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.171.273,00	122.435.012,00	98.60	1.736.261,00
4.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.197.502,00	123.952.040,00	99.80	245.462,00
4.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	44.950.000,00	39.980.000,00	88.94	4.970.000,00
4.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.237.840,00	50.746.673,00	85.67	8.491.167,00
4.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.264.000,00	432.183.898,00	99.52	2.080.102,00
4.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.582.772,00	63.825.000,00	98.83	757.772,00
4.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.582.772,00	63.825.000,00	98.83	757.772,00
4.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.337.515.029,00	1.320.479.494,00	98.73	17.035.535,00
4.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	100.00	-
4.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	64.980.680,00	92.83	5.019.320,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu Anggaran
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
4.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.000.000,00	189.800.000,00	97.84	4.200.000,00
4.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.515.029,00	1.053.698.814,00	99.26	7.816.215,00
4.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.577.722,00	609.890.956,00	98.28	10.686.766,00
4.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.757.900,00	94.444.866,00	98.63	1.313.034,00
4.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.975.822,00	317.615.230,00	97.44	8.360.592,00
4.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.550.000,00	31.984.650,00	98.26	565.350,00
4.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.294.000,00	165.846.210,00	99.73	447.790,00

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKjIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi atas SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun sebelumnya telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP
Badan Perencanaan, Penelitiand dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan					Keterangan
			2025	Tw 2026	Tw II 2026	Tw III 2026	Tw IV 2026	
1.	Agar melakukan pengujian untuk mengetahui sejauhmana bidang-bidang/ unit – unit serta pegawai telah mendalami pemahaman. Kepedulian dan komitmen atas dokumen perencanaan dan hasil pengukuran kinerja melalui penyebaran kuesioner	Penyusunan kuesioner SAKIP						
		Penyebaran kuesioner						
2.	Agar mendokumentasikan *evidence* bentuk perhatian utama Pimpinan OPD terhadap kualitas penyusunan Laporan Kinerja OPD	Penyusunan SK Tim Implementasi SAKIP Bappeda						Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau secara berkala telah melaksankan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja baik dilevel organisasi maupun kinerja individu. Pimpinan telah mendelegasikan tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut kepada tim yang ditunjuk secara khusus. Tim tersebut melaksanakan
		Penysunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025						
		Pelaksanaan *Desk Monitoring* dan evaluasi capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026						

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan					Keterangan
			2025	Tw 2026	Tw II 2026	Tw III 2026	Tw IV 2026	
		Penyusunan laporan *Monitoring* dan evaluasi capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026						kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan. Meskipun pimpinan tidak selalu berkesempatan hadir secara langsung pada setiap pelaksanaan desk evaluasi, perhatian terhadap hasil evaluasi kinerja tetap menjadi prioritas utama. Pimpinan senantiasa memastikan bahwa seluruh temuan, catatan, serta rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, evaluasi dan arahan dari pimpinan juga secara konsisten disampaikan melalui berbagai forum resmi lainnya, seperti rapat staf, apel pagi, maupun pertemuan koordinasi, guna memastikan bahwa seluruh unsur pelaksana

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan					Keterangan
			2025	Tw 2026	Tw II 2026	Tw III 2026	Tw IV 2026	
								memahami target, capaian, serta langkah strategis yang harus dilakukan untuk peningkatan kinerja
3.	Agar mengusulkan tim evaluasi internal mengikuti sosialisasi atau kegiatan lain yang sejenis terkait akuntabilitas kinerja	Penyusunan Data Rencana Pengembangan Kompetensi						- Surat No B/800.2.4.1/215/BPPP/2025 Perihal Penyampaian Data Rencana Pengembangan Kompetensi - Kertas Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi tim evaluasi internal						Pada Tahun 2026, karena keterbatasan ketersediaan anggaran, tidak terdapat anggaran pendidikan dan pelatihan pada DPA Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2026. Namun pengembangan kompetensi tim SAKIP tetap menjadi perhatian dengan memanfaatkan berbagai *platform* pembelajaran yang ada

Kedepan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya secara optimal untuk memperbaiki kinerjanya dalam kerangka mengatasi kendala dan hambatan yang ada. Upaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan kinerja akan tetap dijaga secara akurat dan cermat, serta berdasarkan indikator kinerja yang disepakati secara bersama-sama dengan para *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara obyektif. Selain itu, proses perencanaan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang akan dibuat dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal;
2. Meningkatkan dan menguatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam rangka mewujudkan optimalisasi sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
3. Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan dan inovasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, dunia usaha dan sektor lainnya;
4. Melakukan koordinasi rutin dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka antisipasi potensi tantangan/resiko yang perlu dikelola di kemudian hari.